



**CEPP - FISIP UI**  
Center for Election and Political Party

# **MEMBANGUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI PARLEMEN MODERN & TERBUKA**



---

**Disusun Oleh:**  
**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah**  
&  
**Center for Election Political Party**

**FEBRUARI 2016**

*Jateng*  
gayeng

## **Kata Pengantar**

### **Menteri Dalam Negeri**

Proses konsolidasi demokrasi yang terjadi setelah Reformasi 1998 menuntut seluruh pemangku kepentingan dari semua cabang kekuasaan; eksekutif, legislatif hingga yudikatif untuk dapat melakukan perubahan sikap, pola perilaku, dan karakter kebangsaan dalam kerangka revolusi mental demi mewujudkan cira-cita nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Selaras dengan program Nawa Cita 2.1.3 yang merencanakan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya Pemerintah mendukung upaya membangun Parlemen Modern dan Terbuka yang menekankan kepada keterbukaan akses informasi, penggunaan teknologi, dan penguatan fungsi representasi. Ini sejalan dengan agenda prioritas pemerintah yang menekankan pada peningkatan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Parlemen modern dan terbuka diharapkan mampu memperkuat proses konsolidasi demokrasi dan pembangunan politik secara menyeluruh di Indonesia.

Inisiatif DPRD Provinsi Jawa Tengah membangun Parlemen Modern dan Terbuka diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia untuk melakukan peningkatan kinerja anggota dan lembaga DPRD. Sinergi antara DPRD Provinsi Jawa Tengah dan *Center for Election Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia* dalam proses tersebut merupakan terobosan baru yang perlu terus dikembangkan untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya.

Semoga buku *"Membangun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Parlemen Modern dan Terbuka"* dapat digunakan sebagai acuan peningkatan kinerja DPRD di Indonesia.

Jakarta, Februari 2016

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

**Tjahjo Kumolo. SH**

## **Kata Pengantar**

### **Gubernur Provinsi Jawa Tengah**

Visi Provinsi Jawa Tengah adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, *Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Untuk mewujudkan hal tersebut diharapkan seluruh komponen bangsa di Jawa Tengah dapat berkerja bersama-sama. Pemerintah Daerah dan DPRD harus mampu menjadi panutan dan memberikan contoh kongkrit kepada masyarakat dengan cara bergotong royong mengembangkan sistem kinerja yang terbuka dan transparan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang professional, bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya.

Membangun parlemen modern dan terbuka yang sedang diupayakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan inisiatif dan terobosan baru yang patut didukung. Parlemen Modern dan Terbuka penting, karena bisa lebih mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya, meningkatkan partisipasi masyarakat, mempercepat keterbukaan informasi serta gelombang informasi dari dan ke Parlemen. Selain itu optimalisasi penggunaan teknologi informasi sangat tepat untuk menjawab tantangan pesatnya perkembangan teknologi digital dan globalisasi terlebih lagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 2030).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi kerjasama yang dibangun antara DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan CEPP FISIP Universitas Indonesia dalam rangka membangun parlemen modern dan terbuka. Kerjasama ini perlu didukung sehingga DPRD nantinya akan bisa lebih bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam mewujudkan Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari.

Semarang, Februari 2016

Gubernur Provinsi Jawa Tengah

**H. Ganjar Pranowo, SH., M.IP**

## **Kata Pengantar**

### **Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah**

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Selaras dengan sumpah anggota DPRD yang termaktub dalam pasal 320 UU MD3, bahwa setiap anggota "akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili untuk mewujudkan tujuan nasional, demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia", DPRD Provinsi Jawa Tengah berinisiatif untuk membangun DPRD modern dan terbuka.

DPRD modern dan terbuka merupakan salah satu pintu yang membuka peluang untuk lebih mendekatkan anggota dan lembaga kepada rakyat, mendengarkan suara rakyat dan melibatkan rakyat dalam proses legislasi dan kegiatan Dewan. Sistem pendukung yang dibangun misalnya *website*, media sosial (*Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram*), *Bill Digest* (Rekam Jejak Lembaga Dewan), *Hansard* (Rekam Jejak Anggota Dewan), Membangun Relasi dengan Media, dan lainnya, sangat membantu anggota dewan dalam menjalankan fungsi representasi. Pada akhirnya, sistem tersebut akan memberikan penguatan pada lembaga.

Membangun DPRD modern dan terbuka merupakan investasi demokrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dukungan dan komitmen partai politik, karena partai politik merupakan aktor utama dalam sistem politik perwakilan. Masa depan demokrasi di Indonesia ditentukan oleh wakil-wakil partai politik yang duduk di lembaga perwakilan.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dan CEPP FISIP UI yang telah mencurahkan segenap waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai DPRD Modern dan Terbuka. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Semarang, Februari 2016

Ketua DPRD Priovinsi Jawa Tengah

**Drs. Rukma Setyabudi. MM**

## **Kata Pengantar**

### **Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mendukung inisiatif Pimpinan dan Anggota untuk membangun DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai parlemen modern dan terbuka. Komitmen tersebut akan diwujudkan diantaranya melalui program-program peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya pendukung, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga ahli, serta mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan yang terkait dengan proses terwujudnya DPRD Provinsi Jawa Tengah yang Modern dan Terbuka. Hal tersebut sesuai dengan visi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yakni "Mewujudkan Sekretariat yang berkemampuan untuk mendukung kinerja dalam pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD yang aspiratif, transparan dan akuntabel".

Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019 yang telah menggagas dan memulai kerja membangun DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai DPRD Modern dan Terbuka. Penyusunan buku ini merupakan perwujudan komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang didukung oleh *Center for Election Political Party* (CEPP) FISIP Universitas Indonesia.

Semarang, Februari 2016

Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah

**Drs. Ign Indra Surya, MM**

## **Kata Pengantar**

### **Presiden Direktur CEPP FISIP Universitas Indonesia**

Membangun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang modern dan terbuka adalah sebuah keniscayaan. DPRD modern dan terbuka dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi, penggunaan teknologi informasi, dan menjalankan fungsi representasi. Dengan menjadi parlemen modern dan terbuka, DPRD diharapkan mampu memperkuat demokrasi perwakilan di tingkat daerah.

CEPP FISIP UI adalah pengagas dan penggerak kerja membangun parlemen modern dan terbuka di Indonesia. Kerja ini dimulai sejak 2013, saat CEPP FISIP UI mulai memperkuat Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan kinerja legislasi, pengawasan dan anggaran. Sistem pendukung yang dibangun antara lain: optimalisasi penggunaan *website*, media sosial (*Facebook, Twitter, Youtube dan Instagram*) **Bill Digest** (Rekam Jejak Lembaga Dewan), **Hansard** (Rekam Jejak Anggota Dewan), **Meet the press**, **Meet the Scholars**, **Meet the Local Parliament**, **Roadshow Media**, Kopi Darat dengan *Netizen, Doorstop, Public Service Announcement*, merancang ulang Museum DPR RI, menulis naskah akademis untuk penataan kawasan Parlemen, dan lainnya.

Dengan pengalaman yang dimiliki oleh CEPP FISIP UI, kami memberanikan diri untuk membantu DPRD Provinsi di Indonesia membangun parlemen modern dan terbuka. Buku ini merupakan langkah awal kami untuk membangun DPRD Provinsi Jawa Tengah menjadi DPRD Modern dan Terbuka. Diharapkan buku ini dapat memberikan inspirasi kepada para pembaca untuk lebih memahami konsep dan kerja membangun DPRD Modern dan Terbuka.

Terima kasih kepada Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah mewujudkan kerjasama yang baik ini.

Jakarta, Februari 2016

Presiden Direktur CEPP

**Chusnul Mar'iyah Ph.D**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.....	i
Kata Pengantar Gubernur Provinsi Jawa Tengah.....	ii
Kata Pengantar Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah.....	iii
Kata Pengantar Sekretaris Dewan Provinsi Jawa Tengah.....	iv
Kata Pengantar Presiden Direktur CEPP FISIP UI.....	v
Daftar Isi.....	vi
Bagian A: DPRD Modern dan Terbuka.....	1
Apa itu DPRD Modern dan Terbuka? .....	1
Bagaimana Perkembangan Parlemen Modern dan Terbuka? .....	1
Kapan dan Siapa yang Harus Membangun DPRD Modern dan Terbuka? .....	2
Bagian B: Belajar Dari Pengalaman DPR RI.....	3
1. DPR RI Pascareformasi 1998.....	3
2. DPR RI Menuju Parlemen Modern: Contoh Program.....	4
a. "Kantor" Berita Parlemen.....	5
b. Media Analisis.....	6
c. Workshop dan Peningkatan Kapasitas SDM Tim Humas dan Pemberitaan DPR.....	9
d. Majalah & Buletin Parlemen.....	10
e. TV Parlemen.....	11
f. Meet the Press, Meet the DPR, dan Meet the Scholars.....	11
g. Kunjungan Masyarakat.....	12
h. Museum dan Perpustakaan.....	12
i. Doorstop.....	13
Bagian C: Membangun DPRD Menjadi Parlemen Modern dan Terbuka.....	15
Konteks Sosial-Politik-Ekonomi Provinsi Jawa Tengah.....	23
Menuju DPRD Modern dan Terbuka.....	25
1. Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi.....	27
2. Teknologi Informasi.....	29
3. Fungsi Representasi.....	34

## Bagian A: DPRD Modern dan Terbuka



### Apa Itu DPRD Modern dan Terbuka?

DPRD modern dan terbuka adalah DPRD yang representatif; membuka ruang untuk partisipasi publik; mudah diakses; terbuka dan transparan; serta memanfaatkan teknologi informasi digital. DPRD modern dan terbuka menampung aspirasi publik yang disampaikan baik melalui cara-cara yang konvensional seperti surat/fax, kunjungan langsung, mengirimkan delegasi, maupun dengan cara memanfaatkan teknologi informasi digital seperti surat elektronik, website, Twitter, Facebook, Youtube, dan lain-lain. DPRD Modern dan Terbuka dapat memperkuat

sistem demokrasi perwakilan di daerah. Anggota dan lembaga DPRD didorong untuk menjadi lebih rasional, profesional, transparan, dan akuntabel.

### Bagaimana Perkembangan Parlemen Modern dan Terbuka?

Perkembangan parlemen modern diawali tahun 1997 yaitu pada Konferensi Uni Eropa tentang *"The Future of Democracy: Transition and Challenge in European Governance"* dengan fokus adanya perubahan sosial-masyarakat yang terjadi dan harus dihadapi oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan. Salah satu penyebab perubahan yang penting adalah kondisi lingkungan internasional yang bercirikan globalisasi, trans-nasionalisasi, dan regionalisasi. Melihat kondisi ini, peran teknologi komunikasi dan informasi digital sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di era globalisasi, khususnya yang harus dihadapi oleh parlemen sebagai lembaga demokrasi yang harus bersifat terbuka terhadap rakyatnya.

Selanjutnya, konferensi serupa terkait dengan keterbukaan akses informasi dilaksanakan di Jerman pada tahun 2003. Keterbukaan akses informasi di era demokrasi merupakan hal yang penting, terutama informasi yang berkaitan dengan kinerja parlemen. Hasil konferensi ini adalah pentingnya peningkatan dukungan terkait keterbukaan akses berbagai dokumen, informasi, dan data yang ada di parlemen untuk dapat digunakan oleh masyarakat tanpa ada restriksi hukum.

Perkembangan keterbukaan informasi terus berlangsung hingga pada tahun 2012 dengan dilaksanakan *Declaration on Parliamentary Openness* dalam event *World e-Parliament Conference* di Roma, Italia.

Membangun parlemen modern dan terbuka adalah tuntutan perubahan zaman. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

1. Kemenangan sistem politik demokrasi (*wave of democracy*). Ini terlihat dari runtuhnya negara-negara otoritarian di Asia dan Afrika, negara-negara komunis di Eropa Timur dan negara-negara junta militer di Amerika Latin. Sistem politik demokrasi telah membawa perubahan penting di parlemen, yaitu adanya dorongan untuk mengakomodasi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya, dan ketika melakukan komunikasi dengan konstituennya.
2. Kemajuan teknologi informasi digital dan era globalisasi yang melahirkan masyarakat informasi tanpa batasan negara (*stateless information society*). Salah satu dampaknya adalah parlemen yang dahulu mengadopsi teknologi "komunikasi analog" yang bersifat *paper based* mulai ditinggalkan. Pola komunikasi anggota parlemen dengan para konstituen yang sebelumnya bersifat tatap-muka, berbiaya tinggi, menyita waktu, dan birokratis, secara bertahap berubah karena menggunakan berbagai sarana teknologi di era digital.

#### **Kapan dan Siapa yang Harus Membangun DPRD Modern dan Terbuka?**

Mewujudkan DPRD modern dan terbuka merupakan jawaban atas tantangan masa depan bangsa dan negara. Sejak Reformasi 1998, tuntutan publik akan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas tidak terbendung lagi. Publik yang semakin kritis akibat kemajuan teknologi informasi dan pengaruh globalisasi perlu diantisipasi dengan baik dan responsif oleh lembaga parlemen dalam menjalankan fungsinya.

Membangun DPRD modern dan terbuka membutuhkan waktu serta proses, dan itu harus dimulai saat ini. DPRD periode 2014-2019 diharapkan memberikan prioritas untuk kerja membangun modern dan terbuka, melalui berbagai program kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan.

## Bagian B: Belajar dari Pengalaman DPR RI

### Pendahuluan

Parlemen modern dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga kepada publik, dengan cara memberikan akses untuk mendapatkan informasi apa yang terjadi di dalam lembaga dewan dan membuka ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Dalam membangun DPR modern, transparansi dan keterbukaan akses terhadap informasi menjadi hal mendasar yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya demokrasi.

"A Modern Parliament in a Modern Democracy" adalah target yang perlu dipertimbangkan oleh lembaga perwakilan di Indonesia.

Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan dukungan dari semua *stakeholders*. Keberhasilan mencapai parlemen modern juga ditentukan oleh kerja sama dan koordinasi lintas unit kerja Sekretariat Dewan sebagai *supporting system* (sistem pendukung).



Dalam upaya mewujudkan parlemen yang modern dan terbuka, DPRD bisa belajar dari pengalaman Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang sudah mulai membangun parlemen modern sejak 2013 hingga saat ini.

### A. DPR RI Pascareformasi 1998

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah melewati perjalanan yang panjang. Salah satu peristiwa besar terjadi pada tahun 1998 ketika rakyat Indonesia berhasil mengakhiri rezim otoriter dan melakukan reformasi sistem politik. Dalam konteks ini, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dituntut untuk dapat merespons perubahan tersebut. Di era teknologi informasi, DPR diharapkan dapat memanfaatkan perkembangannya dengan baik.

#### *Infrastruktur dan Sarana Pendukung*

Untuk memfasilitasi tercapainya parlemen modern dan terbuka, diperlukan sarana dan infrastruktur yang memadai. Ada fakta yang tidak banyak diketahui oleh publik, bahwa

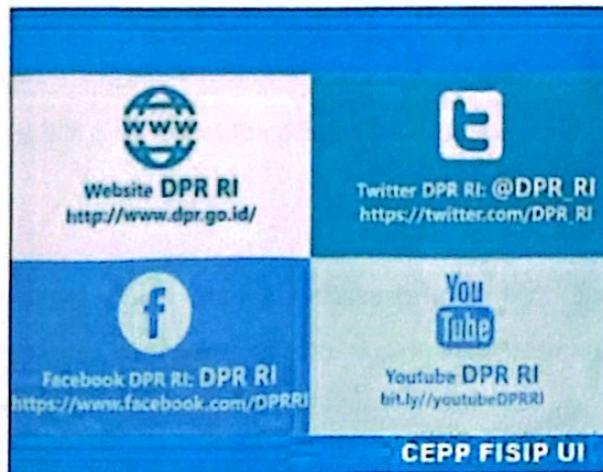


ternyata selama 70 tahun merdeka, Indonesia belum pernah membangun gedung khusus yang diperuntukkan bagi lembaga legislatif. Gedung DPR yang ada saat ini merupakan alih fungsi dari Gedung *CONEFO* (*Conference of New Emerging Forces*). Oleh karena itu, dibutuhkan gedung parlemen yang representatif sebagai simbol negara, dan yang dapat memfasilitasi seluruh kegiatan DPR sebagai parlemen modern.

## B. DPR RI Menuju Parlemen Modern

### 1. Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi

Dalam membangun parlemen modern, DPR sudah memiliki dasar hukum, seperti: [a] Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik; [b] UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan data di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR, pada 2014 setidaknya tercatat



511 orang/badan/ lembaga yang meminta informasi tentang risalah rapat dan informasi-informasi lainnya yang terkait dengan DPR dengan jumlah jenis data sebanyak 1.288. Laporan persidangan yang sifatnya terbuka juga sudah dipublikasikan secara langsung melalui homepage [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Namun, program kerja tersebut belum dikelola secara lintas unit kerja.



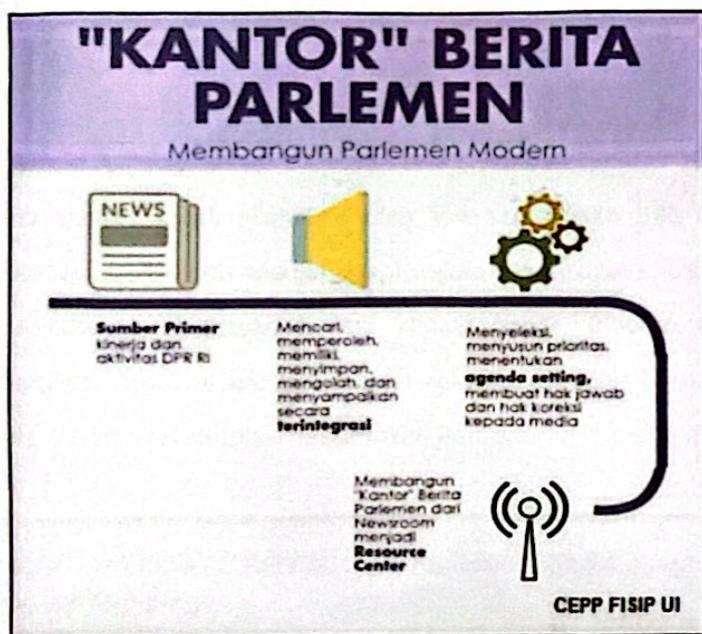
Sejak tahun 2011, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI juga telah menyusun Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan BURT Nomor: 08/BURT/DPRRI/I/2010-2011 tentang Penetapan

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI. Hal ini dimaksudkan agar masukan, kritikan, keluhan dan saran dari masyarakat terkait tugas, fungsi dan kewenangan DPRD RI dapat ditampung dan ditindaklanjuti dengan baik.

Dalam pelaksanaannya masyarakat juga dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung baik itu berupa kunjungan langsung maupun mengirimkan delegasi, atau melalui media elektronik diantaranya laman (*website*) <http://pengaduan.dpr.go.id> maupun SMS aspirasi DPR RI di nomor 08119443344 yang ditujukan kepada alat kelengkapan dewan maupun opini pembaca melalui majalah parlementaria, juga melalui surat melalui pos yang ditujukan kepada Ketua DPR RI dengan alamat Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270. Aspirasi dan pengaduan dari publik sudah direspon dengan baik, namun perlu tindak lanjut yang konkrit.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi, DPR RI melakukan penguatan terhadap beberapa program kegiatan secara berkelanjutan dan menambah program-program baru yang relevan, di antaranya:

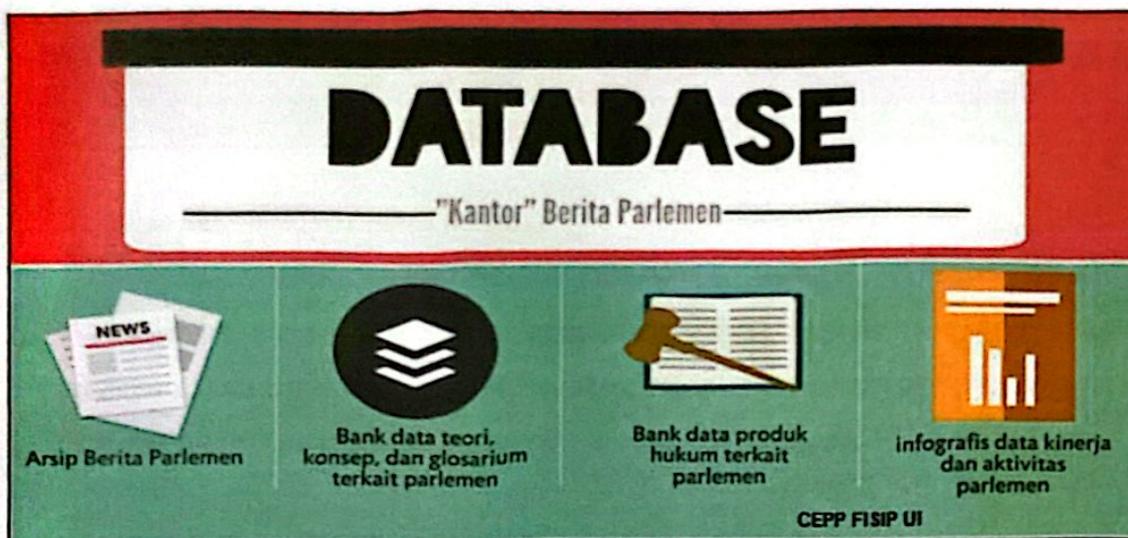
a. **"Kantor" Berita Parlemen**



"Kantor" Berita Parlemen merupakan kebutuhan mendasar untuk menunjang cita-cita membangun parlemen modern. "Kantor" dibangun sebagai pusat informasi resmi DPR RI yang disebarluaskan kepada publik melalui: media cetak (majalah dan buletin), media penyiaran (TV Parlemen), media online (TV Parlemen *Streaming*), *website* dan *social media*. Hal ini

bertujuan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dewan. "Kantor" ini akan menyeleksi, menyusun prioritas, menentukan agenda setting, membuat hak jawab dan hak koreksi kepada media dan publik.

Melalui "kantor" ini, DPRRI diharapkan menjadi *trend-setter* isu-isu tentang kelembagaan DPR yang berkembang di media. Dengan demikian DPR RI dapat menyampaikan informasi yang benar dan sesuai dengan apa yang terjadi dalam proses politik di dalamnya. Informasi yang diproduksi oleh DPR RI sebagai dokumen negara kemudian disimpan secara sistematis, baik, dan rapi. Untuk itu, penguatan sistem *database* informasi menjadi hal yang diperhatikan. *Database* adalah bank data dan informasi yang menunjang "Kantor" Berita Parlemen. Dengan demikian berita yang disampaikan selalu berdasarkan data dan informasi informasi yang cepat, tepat dan akurat.



### **b. Media Analisis**

Media analisis sudah dilakukan oleh Tim Kehumasan DPR RI secara rutin. Tim Kehumasan menganalisis tiga jenis media, yakni media cetak, *online*, dan penyiaran. Hasil analisis media adalah berupa ringkasan berita, kliping berita, laporan rekapitulasi isu berita, laporan rekapitulasi *headline* berita, laporan rekapitulasi *tone* berita, laporan rekapitulasi *tone* per media, laporan rekapitulasi *newsmaker*, dan laporan rekapitulasi rekomendasi.

---

*Media Cetak meliputi: Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Republika, Jawa Pos, dan Koran Tempo*

*Media Online meliputi: Detikcom, Yahooonews, dan Vivanews*

---

Tujuan dari media analisis adalah diperolehnya penjelasan tentang *trend* berita (*tone* berita, *isu*, *headline*, jumlah berita, *newsmaker*) mengenai DPR yang bersumber dari media massa.

### Tone Analisis Media

Tone analisis media adalah interpretasi terhadap *framing* media tentang berita DPR. Penulisan *tone* analisis media dilakukan berdasarkan dua pertimbangan, yaitu: [1] fungsi DPR (fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran); dan [2] asas parlemen modern (keterbukaan, penggunaan teknologi informasi, dan fungsi perwakilan).

### Klasifikasi tone

Positif	Netral	Negatif
Berita digolongkan dalam <i>tone</i> positif jika DPR menjalankan fungsinya dan/atau menjalankan asas parlemen modern.	Berita digolongkan dalam <i>tone</i> netral jika berita tersebut tidak berkaitan dengan fungsi DPR dan asas parlemen modern.	Berita digolongkan ke dalam <i>tone</i> negatif ketika DPR belum menjalankan fungsinya dan/atau menjalankan asas parlemen modern.

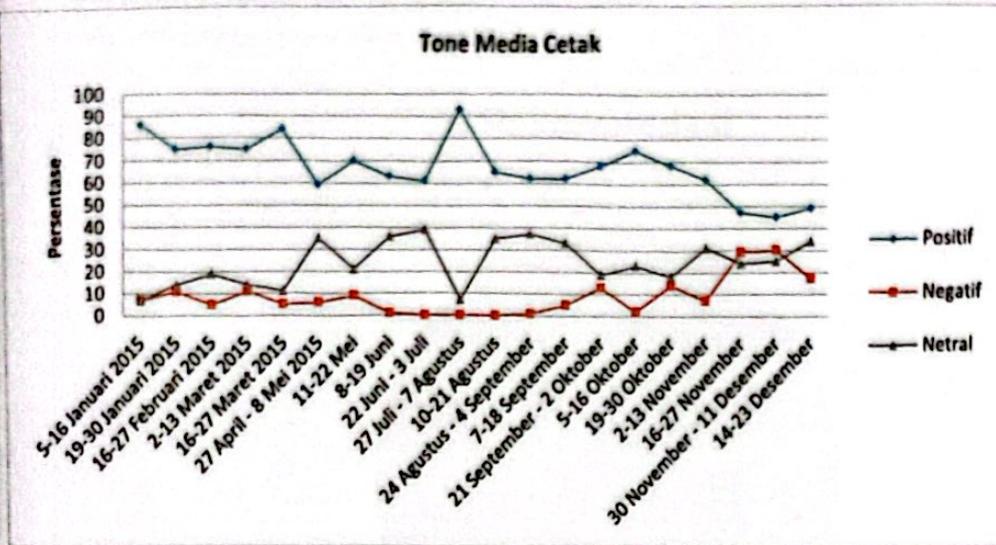
### Penulisan Rekomendasi Analisis Media

Rekomendasi analisis media menjadi bahan pertimbangan Pimpinan Dewan untuk ditindaklanjuti berupa diantaranya mengeluarkan *press release*, menyelenggarakan *press conference*, juga tindak lanjut berupa kebijakan. Bahan pertimbangan pimpinan merujuk kepada hasil media analisis dan analisis isu-isu yang sedang dibahas dewan.

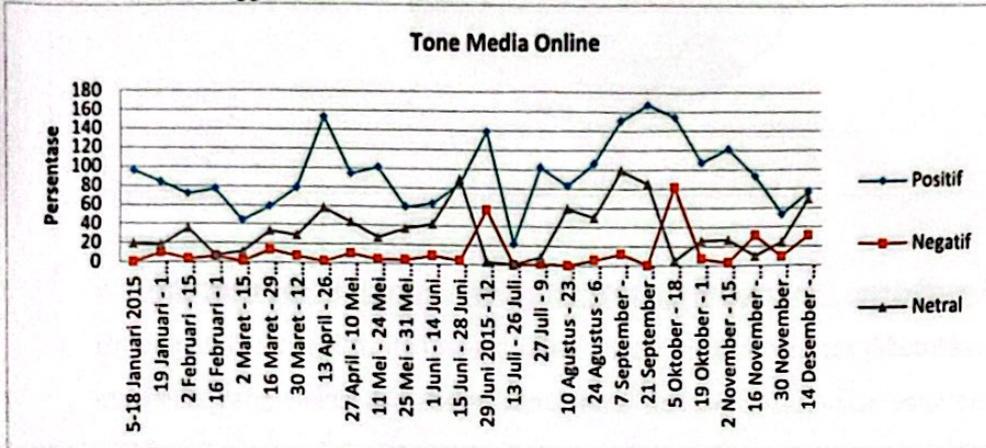
### Klasifikasi rekomendasi analisis media

Tone	Rekomendasi	Tindakan	Indikator	
Negatif	Diketahui	-	Sebuah berita negatif perlu untuk diketahui ketika dianggap tidak memiliki urgensi terhadap kinerja DPRD.	
	Dicermati	-	Sebuah berita negatif perlu untuk dicermati ketika dianggap memiliki potensi untuk berkembang di media dan menyebabkan DPRD tidak dapat menjalankan tugas dengan efektif.	
	Ditindaklanjuti	<i>Press Release</i>		Sebuah berita negatif perlu untuk ditindaklanjuti ketika dianggap memiliki dampak negatif terhadap DPRD. Tindakan disesuaikan dengan tingkat signifikansi berita dan isu yang muncul.
		<i>Press Conference</i>		
<i>Blocking/Advertorial</i>				
Hak Jawab				
	Somasi			
Netral	Diketahui	-	Sebuah berita netral perlu untuk diketahui ketika dianggap tidak memiliki urgensi terhadap citra DPRD.	
	Dicermati	-	Sebuah berita netral perlu untuk dicermati ketika dianggap memiliki potensi untuk berkembang di media.	

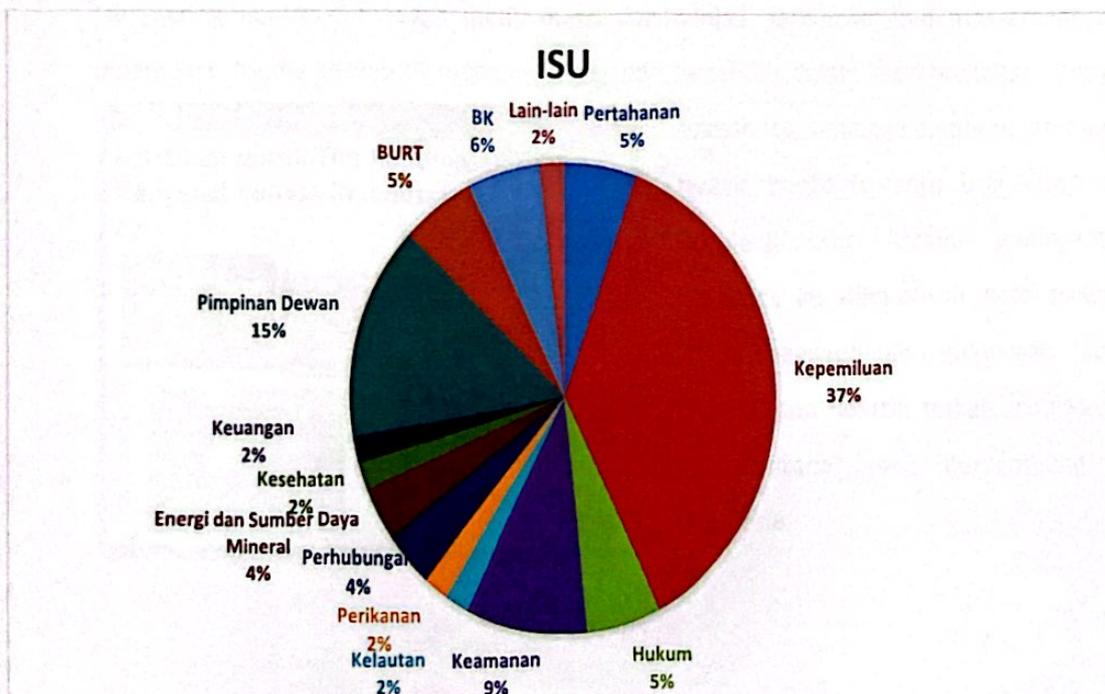
Tone Media Cetak hingga 23 Desember 2015

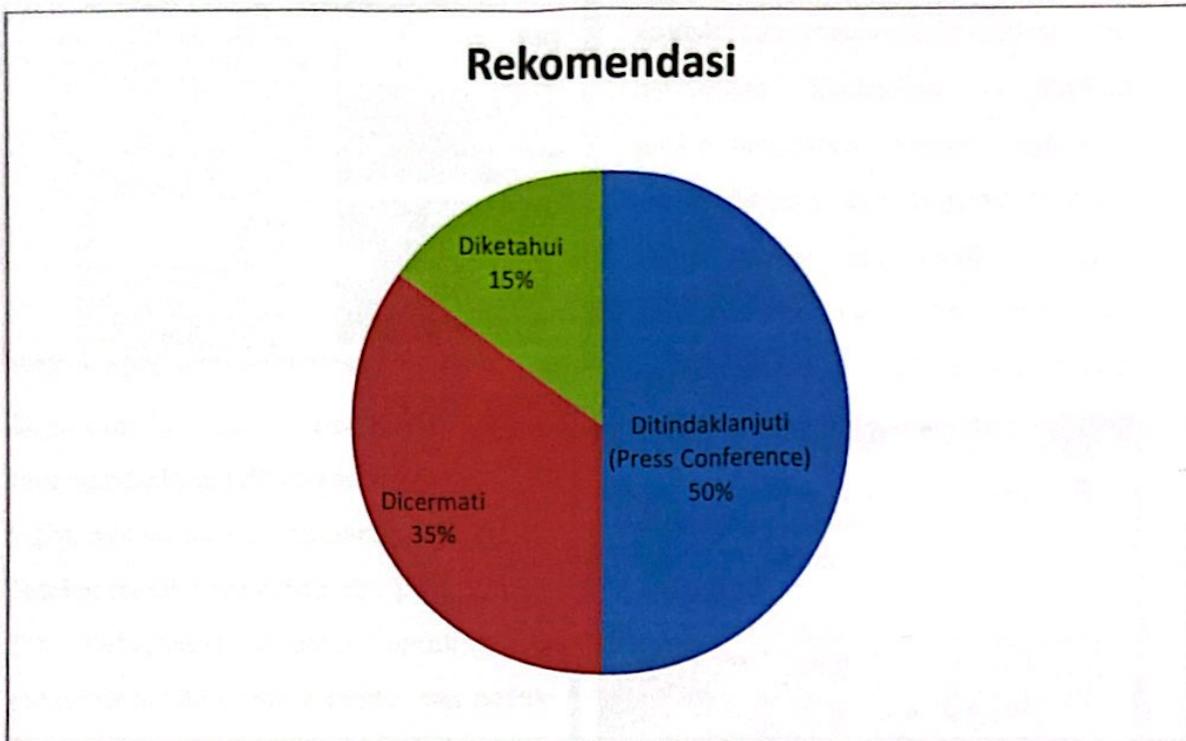


Tone Media Online hingga 23 Desember 2015



Contoh Sebaran Isu Media Mengenai DPR RI





**c. Workshop dan Peningkatan Kapasitas SDM Tim Humas dan Pemberitaan DPR**

Untuk membuat analisis dan media rekomendasi yang berkualitas dibutuhkan tata bahasa Indonesia yang efektif dan efisien serta sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan, maka dari itu diperlukan Pelatihan Bahasa Indonesia dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Tim Humas dan Pemberitaan DPR. Selain itu, workshop yang berkaitan dengan isu-isu yang sering dibahas di berbagai media massa dan menjadi perbincangan di masyarakat juga diperlukan. Media seringkali mempunyai agenda tersendiri dalam memberitakan tentang



sebuah isu, sehingga pemberitaan media terkait berita tertentu bisa diragukan keobjektifannya. Melalui peningkatan kapasitas ini diharapkan para peserta akan mendapatkan gambaran yang objektif dan holistik terkait dengan isu dan wacana yang berkembang di Indonesia.



Dalam menunjang kinerja tim Kehumasan DPR dalam menyusun analisis dan media rekomendasi yang berkualitas dibutuhkan pemahaman secara mendalam tentang bagaimana media bekerja dan bagaimana relasi antara media dan politik. Sehingga dalam melakukan analisis *framing* dan isi terkait pemberitaan DPR di media bisa

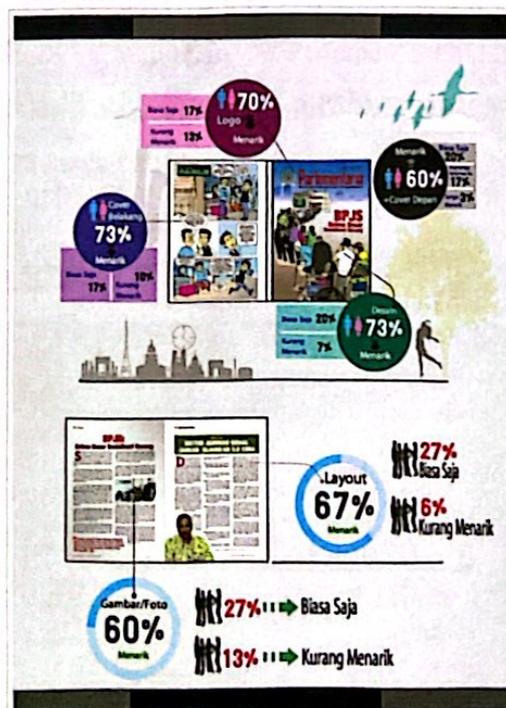
dilakukan secara maksimal. Media rekomendasi yang dihasilkan pun bisa secara tepat menjawab isu pemberitaan di media. Setelah melalui workshop dan pelatihan ini, Tim Kehumasan dituntut untuk dapat memahami relasi antara media dan politik, juga dapat memahami proses agenda setting media dari berbagai sudut pandang media.



**d. Majalah & Buletin Parlemataria**

DPR RI memiliki majalah dan buletin *Parlementaria* sebagai sarana dalam mengomunikasikan kegiatan DPR kepada seluruh anggota dan publik. Majalah *Parlementaria* terbit satu bulan sekali. Isi berita dalam majalah *Parlementaria* bersifat spesifik mengenai kinerja AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Sedangkan buletin terbit satu minggu sekali. Buletin *Parlementaria* memuat konten kegiatan mingguan AKD.

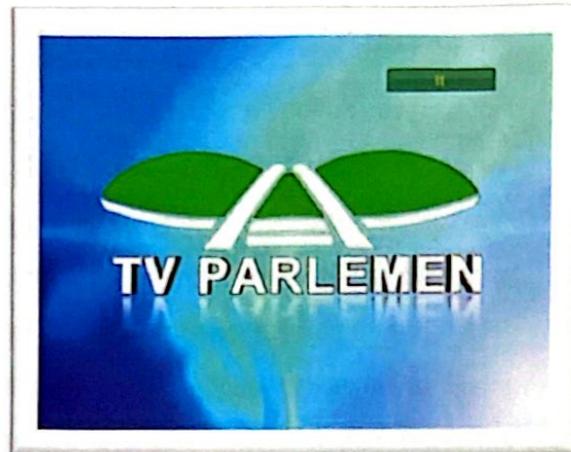
Majalah dan buletin didistribusikan kepada 560 anggota DPR, lembaga negara, kementerian, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi, LSM, kedutaan besar, kantor kecamatan, Bandara Soekarno Hatta Terminal 1 & 2 dan



Stasiun Kereta Api Gambir. Secara keseluruhan majalah dan buletin *Parlementaria* disebar ke 6.650 titik; 150 titik berada di luar negeri (KBRI dan Konsulat Jenderal) dan 6.500 titik di dalam negeri.

**e. TV Parlemen**

DPR RI saat ini telah memiliki TV Parlemen sebagai program untuk menginformasikan kegiatan dewan, baik di dalam maupun di luar gedung DPR RI melalui televisi *streaming* yang ditayangkan melalui jaringan internet selama 24 jam. TV Parlemen adalah unit produksi televisi siaran terbatas di bawah Biro Humas dan Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI, diresmikan pada tanggal 8 Januari 2007 oleh Ketua DPR RI Agung Laksono.



TV Parlemen secara bertahap telah memulai kegiatan operasional berupa siaran langsung rapat paripurna, peliputan kegiatan rapat-rapat komisi, dan alat kelengkapan dewan lainnya,serta memproduksi program acara dialog/talkshow.Siaran TV Parlemen dapat dinikmati melalui jaringan TV Plasma di lingkungan gedung DPR RI Senayan Jakarta dan *livestreaming* melalui situs [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) dan [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id) khusus untuk acara siaran langsung sidang MPR RI, juga jaringan televisi nasional yang me-*relay* siaran TV Parlemen.Pada awalnya, seluruh kegiatan disiarkan dengan media TV LCD (di lingkungan DPR), kemudian TV Parlemen memperluas jangkauannya melalui kerja sama dengan media televisi berlangganan *Berita SatuTV*, *First Media* dan *Big TV* di Gedung DPR RI Jakarta pada Selasa 28 Januari 2014.

**f. Meet the Press, Meet the DPR, dan Meet the Scholars**

Kegiatan ini merupakan program rutin yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Program ini menjadi forum pertemuan Pimpinan DPR RI dengan pimpinan redaksi media massa, pimpinan DPR Provinsi Se-Indonesia, dan *scholars*. Kegiatan ini bertujuan untuk



membangun komunikasi dan juga menjadi forum konsultasi publik untuk membahas berbagai isu yang sedang berkembang.

Hal penting dalam kegiatan ini adalah terjalannya komunikasi yang baik sehingga berbagai aspirasi yang dimiliki dan disampaikan oleh rakyat dapat diproses secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip parlemen modern.

**g. Kunjungan Masyarakat**



Kegiatan pendidikan politik bagi publik telah dilakukan oleh DPR RI, salah satunya melalui program Kunjungan Masyarakat. Dalam program ini publik dapat mengenal lebih jauh mengenai peran dan fungsi DPR. Kegiatan ini meliputi diskusi atau dialog secara langsung dengan Anggota Dewan/Setjen, pemutaran film, kunjungan museum, dan dapat hadir dalam rapat-rapat terbuka DPR RI.

Saat ini, publik yang ingin berkunjung dapat menghubungi Bagian Humas DPR RI untuk mengatur jadwal berkunjung dengan cara menelepon dan mengirimkan surat resmi. Kelak, publik dapat mengatur jadwal kunjungan mereka secara online (melalui website).

**Museum dan Perpustakaan**

filosofi museum dan perpustakaan DPR RI adalah menjadi *state collective memories* (memori kolektif bangsa) dan *state collective knowledge* (pengetahuan kolektif bangsa). Hal ini penting untuk memelihara dan menjaga dengan baik dokumen-dokumen negara sehingga rekam jejak sejarah politik bangsa dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Museum dan Perpustakaan DPR RI bertujuan untuk menjadi simbol



monumental yang membanggakan baik di tingkat nasional maupun internasional.



i. Doorstop

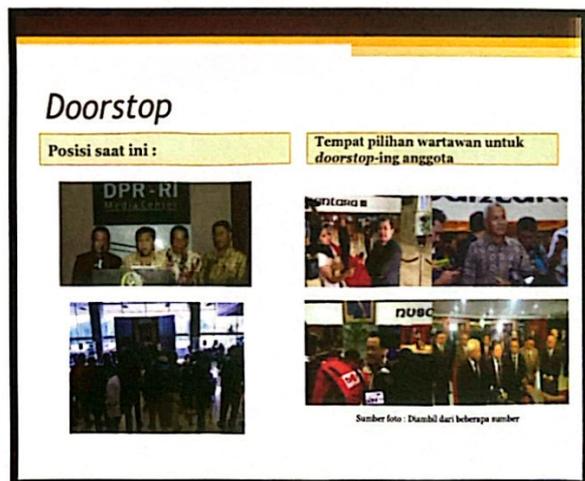


Dalam wawancara yang berlangsung di gedung DPR-RI, dilakukan dengan mencegat dan mengelilingi narasumber sangat sering dilakukan oleh para jurnalis. Padahal wawancara dengan metode tersebut sangat mengganggu pihak narasumber dan sangat mungkin menimbulkan opini-opini yang salah karena tanpa didukung data yang akurat.

Penyebabnya adalah ketidaksiapan narasumber dalam menghadapi wawancara mendadak. Berdasarkan pengalaman ini Tim Ahli Kehumasan DPR-RI mengusulkan membuat sebuah Doorstop sebagai sarana untuk mewawancarai Anggota Dewan sebagai narasumber.

Doorstop, merupakan sebuah istilah yang umum digunakan di kalangan pers merujuk kepada kegiatan wawancara yang dilakukan dengan mencegat narasumber. Istilah ini populer di kalangan pers di banyak negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris. Namun, dalam pelaksanaannya di negara-negara seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, bukan berarti Doorstop dilakukan dengan tanpa aturan. Aturan-

aturan yang mengikat juga diberikan terutama pada pelaksanaannya di gedung-gedung pemerintahan. Selain itu Doorstop di negara-negara tersebut juga telah mulai difasilitasi dengan penempatan lokasi-lokasi tertentu untuk wawancara. Lokasi-lokasi tersebut juga dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana penunjang yang mencukupi.





Sarana Doorstop ditujukan untuk menjadi media bagi anggota dan pimpinan DPRD-RI serta mitra-mitra kerjanya untuk memberikan pernyataan pers dalam rangka memberi informasi-informasi untuk pemberitaan yang terkait. Doorstop juga ditujukan agar dapat menjadi tempat yang representatif dan kredibel bagi pernyataan-pernyataan tersebut. Terutama agar dapat menjadi ikon resmi yang melambangkan

pernyataan pers di DPR-RI agar semakin bersahabat dengan media massa dan masyarakat luas. Sarana Doorstop juga diharapkan mampu memberikan ruang yang cukup bagi narasumber agar dapat nyaman dan tenang menjawab pertanyaan-pertanyaan pers.

## Bagian C: Membangun DPRD Menjadi Parlemen Modern dan Terbuka

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan yang berkedudukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3), di setiap provinsi dan kabupaten kota di Indonesia memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Tugas dan fungsi DPRD, seperti yang tercantum dalam Pasal 314 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



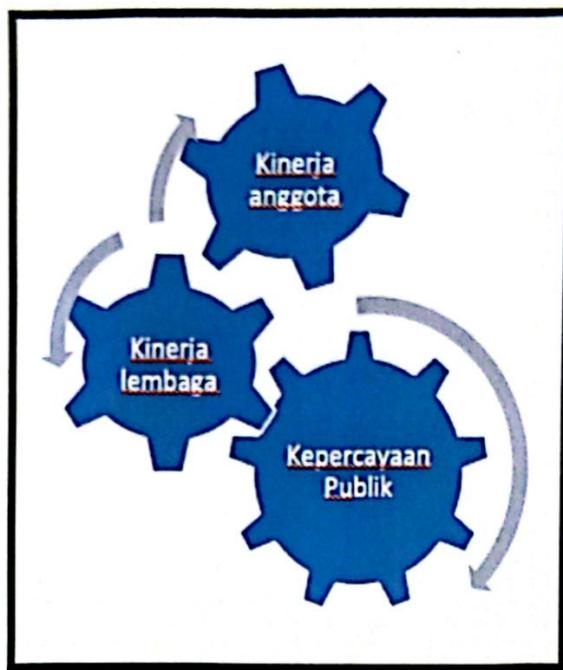
Perwakilan Rakyat Daerah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU MD3, meliputi fungsi: legislasi, anggaran dan, fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Fungsi ini merupakan fungsi yang identik seperti yang di emban oleh DPR RI, hanya

saja ruang lingkup kekuasaannya berbeda, yaitu pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Dalam menunjang kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dibentuklah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terdiri dari: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan AKD lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Berdasarkan Pasal 237 UU MD3, jumlah Pimpinan DPRD disesuaikan dengan jumlah anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Daerah yang jumlah anggotanya sampai dengan 100 orang, Pimpinan DPRD akan terdiri dari satu orang ketua dan empat orang wakil ketua. Sementara itu, DPRD yang terdiri dari 45-84 anggota akan memiliki

satu orang ketua ketua dan tiga orang wakil ketua, dan DPRD yang memiliki anggota sebanyak 33-44 orang akan dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua.

Sesuai dengan struktur dan tata laksana pada DPR RI, dalam struktur DPRD juga terdapat komisi-komisi yang menangani berbagai bidang. Pada pasal 239 UU MD3, mengatur bahwa jumlah komisi pada suatu DPRD disesuaikan dengan jumlah anggota DPRD. DPRD yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk empat komisi, yang pada umumnya terdiri dari: komisi pemerintahan, komisi perekonomian dan keuangan, komisi pembangunan, dan komisi kesejahteraan rakyat. Sementara itu, DPRD yang beranggotakan lebih dari 55 orang,



dapat membentuk lima komisi, yang pada umumnya terdiri dari: komisi pemerintahan, komisi perekonomian, komisi keuangan, komisi pembangunan, dan komisi kesejahteraan rakyat.

Untuk dapat mendorong DPRD dalam menjalankan tugasnya secara maksimal tentu DPRD perlu melakukan reformasi sistem lembaga perwakilan. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perubahan menjadi DPRD yang modern dan terbuka. Penggunaan teknologi informasi melalui website dan sosial media (facebook, twitter dan youtube) belum menjadi perhatian utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam data dibawah ini.

- ❖ Hanya 25 DPRD dari total 34 atau sebesar 73,5% yang memiliki website aktif (Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kepri, Babel, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Yogya, Jatim, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sulse, Sultra, NTB, Maluku, Malut.)
- ❖ Hanya 9 DPRD dari total 34 atau sebesar 26,5% yang memiliki akun Facebook Aktif. DPRD (Riau, Sumsel, Babel, Lampung, DKI, Jabar, Kaltim, Sultra, Maluku).
- ❖ Hanya 10 DPRD dari total 34 atau sebesar 29,4% yang memiliki akun Twitter Aktif (Riau, Babel, Lampung, DKI, Jabar, Kalbar, Kaltim, NTB, Sulse, Sultra)
- ❖ Hanya 1 DPRD dari total 34 atau sebesar 2,9% yang memiliki channel youtube aktif (Bangka Belitung)

*Data per 31 Januari 2016*

Daftar Website dan Akun Sosial Media DPRD Se-Indonesia

No	Provinsi	Infrastruktur Website		Alamat Website dan Media Sosial					
		Website	Status	Website	Facebook	Twitter	Youtube	Ket	
1	Provinsi Aceh	Ada	Aktif	<a href="http://www.DPRDa.acehprov.go.id">www.DPRDa.acehprov.go.id</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
2	Provinsi Sumatera Utara	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-sumutprov.go.id">http://DPRD-sumutprov.go.id</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
3	Provinsi Sumatera Barat	Ada	Aktif	<a href="http://www.DPRD-sumbarprov.go.id">http://www.DPRD-sumbarprov.go.id</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
4	Provinsi Riau	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-riau.go.id/">http://DPRD-riau.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/HUMAS-DPRD-Provinsi-RIAU-532671810234651">https://www.facebook.com/HUMAS-DPRD-Provinsi-RIAU-532671810234651</a>	<a href="https://twitter.com/DPRDDRiau">https://twitter.com/DPRDDRiau</a>	Tidak Ada	-	
5	Provinsi Kepulauan Riau	Ada	Aktif	<a href="http://www.DPRD-kepriprov.go.id">http://www.DPRD-kepriprov.go.id</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
6	Provinsi Sumatera Selatan	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD.sumselprov.go.id/">http://DPRD.sumselprov.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/DPRDDPRDovinsiSumateraSelatan">https://www.facebook.com/DPRDDPRDovinsiSumateraSelatan</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
7	Provinsi Bangka Belitung	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-babelprov.go.id">http://DPRD-babelprov.go.id</a>	<a href="https://www.facebook.com/DPRDbabel">https://www.facebook.com/DPRDbabel</a>	<a href="https://twitter.com/DPRDDBabel">https://twitter.com/DPRDDBabel</a>	<a href="https://www.youtube.com/channel/UCTp3eFXQRT2n3LP5Olc6BmA">https://www.youtube.com/channel/UCTp3eFXQRT2n3LP5Olc6BmA</a>	Socmed terintegrasi di dalam website	
8	Provinsi Bengkulu	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD.bengkuluprov.go.id">http://DPRD.bengkuluprov.go.id</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
9	Provinsi Jambi	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-jambiprov.go.id">http://DPRD-jambiprov.go.id</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
10	Provinsi Lampung	Ada	Aktif	<a href="http://www.DPRD-lampungprov.go.id/">http://www.DPRD-lampungprov.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/DPRD-Provinsi-Lampung-151231628265102">https://www.facebook.com/DPRD-Provinsi-Lampung-151231628265102</a>	<a href="https://twitter.com/DPRDDiamampung">https://twitter.com/DPRDDiamampung</a>	Tidak Ada	-	
11	Provinsi Banten	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-bantenprov.go.id">http://DPRD-bantenprov.go.id</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	

					<a href="http://www.DPRD-dki.jakartaprov.go.id">http://www.DPRD-dki.jakartaprov.go.id</a>	<a href="https://www.facebook.com/DPRD-Propinsi-DKI-Jakarta-900618620019758/">https://www.facebook.com/DPRD-Propinsi-DKI-Jakarta-900618620019758/</a>	<a href="https://twitter.com/DPRDDdkj-akarta">https://twitter.com/DPRDDdkj-akarta</a>	Tidak Ada	Socmed terintegrasi di dalam website
12	Provinsi DKI Jakarta	Ada	Aktif					Tidak Ada	-
13	Provinsi Jawa Barat	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD.jabarprov.go.id">http://DPRD.jabarprov.go.id</a>	<a href="https://www.facebook.com/DPRD-Jawa-Barat-69554153200/?fref=ts">https://www.facebook.com/DPRD-Jawa-Barat-69554153200/?fref=ts</a>	<a href="https://twitter.com/humasDPRDd">https://twitter.com/humasDPRDd</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	-
14	Provinsi Jawa Tengah	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD.jatengprov.go.id/">http://DPRD.jatengprov.go.id/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
15	Provinsi DI Yogyakarta	Ada	Aktif	<a href="http://www.DPRD-diy.go.id">http://www.DPRD-diy.go.id</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
16	Provinsi Jawa Timur	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD.jatimprov.go.id/">http://DPRD.jatimprov.go.id/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
17	Provinsi Kalimantan Barat	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-kalbarprov.go.id">http://DPRD-kalbarprov.go.id</a>	Tidak Ada	<a href="https://twitter.com/DPRDDPRDovkb">https://twitter.com/DPRDDPRDovkb</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	-
18	Provinsi Kalimantan Selatan	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-kalselprov.go.id/">http://DPRD-kalselprov.go.id/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
19	Provinsi Kalimantan Tengah	Ada	Aktif	<a href="http://www.DPRD-kaltengprov.go.id/">http://www.DPRD-kaltengprov.go.id/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
20	Provinsi Kalimantan Timur	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-kaltimprov.go.id/">http://DPRD-kaltimprov.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/DPRD-Propinsi-Kalimantan-Timur-752775194788529/?fref=ts">https://www.facebook.com/DPRD-Propinsi-Kalimantan-Timur-752775194788529/?fref=ts</a>	<a href="https://twitter.com/DPRDDkaltim">https://twitter.com/DPRDDkaltim</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	-
21	Provinsi Kalimantan Utara	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
22	Provinsi Bali	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
23	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-

24	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-ntbprov.go.id/">http://DPRD-ntbprov.go.id/</a>	Tidak Ada	<a href="https://twitter.com/DPRDNTB">https://twitter.com/DPRD_NTB</a>	Tidak Ada	-
25	Provinsi Sulawesi Selatan	Ada	Aktif	<a href="http://www.DPRDdsulsel.go.id">http://www.DPRDdsulsel.go.id</a>	Tidak Ada	<a href="https://twitter.com/DPRDdsulselprov">https://twitter.com/DPRDdsulselprov</a>	Tidak Ada	-
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	Ada	Aktif	<a href="http://www.DPRD-sultraprov.go.id/">http://www.DPRD-sultraprov.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/pages/Sekretariat-DPRD-Prov-Sultra/509728935814804">https://www.facebook.com/pages/Sekretariat-DPRD-Prov-Sultra/509728935814804</a>	<a href="https://twitter.com/DPRD_prov">https://twitter.com/DPRD_prov</a>	Tidak Ada	-
27	Provinsi Sulawesi Tengah	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
28	Provinsi Sulawesi Barat	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
29	Provinsi Gorontalo	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
30	Provinsi Sulawesi Utara	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
31	Provinsi Maluku	Ada	Aktif	<a href="http://www.DPRD-malukuprov.go.id/">http://www.DPRD-malukuprov.go.id/</a>	<a href="https://www.facebook.com/DPRD-Propinsi-Maluku-269277183157465/">https://www.facebook.com/DPRD-Propinsi-Maluku-269277183157465/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	-
32	Provinsi Maluku Utara	Ada	Aktif	<a href="http://DPRDmalut.com">http://DPRDmalut.com</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
33	Provinsi Papua	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
34	Provinsi Papua Barat	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-

Daftar Website dan Akun Sosial Media Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Infrastruktur Website		Alamat Website dan Media Sosial							Keterangan
		Webiste	Status	Website	Twitter	Facebook	Youtube	Facebook			
1	Kota Semarang	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ditautkan dengan website Pemkot Semarang
2	Kota Surakarta	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-surakartakota.go.id/">http://DPRD-surakartakota.go.id/</a>	<a href="https://twitter.com/surakarta_DPRD">https://twitter.com/surakarta_DPRD</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	<a href="https://www.youtube.com/user/DPRDSDURAKARTA">https://www.youtube.com/user/DPRDSDURAKARTA</a>	Tidak Ada	-	
3	Kota Salatiga	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-salatigakota.go.id/">http://DPRD-salatigakota.go.id/</a>	<a href="https://twitter.com/PRD_Salatiga">https://twitter.com/PRD_Salatiga</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
4	Kota Tegal	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-tegalkota.go.id/">http://DPRD-tegalkota.go.id/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
5	Kota Magelang	Ada	Tidak Aktif	<a href="http://DPRD.magelangkota.go.id/">http://DPRD.magelangkota.go.id/</a>	<a href="https://twitter.com/PRD_kotamgl">https://twitter.com/PRD_kotamgl</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	twitter double account	
6	Kota Pekalongan	Ada	Aktif	<a href="http://www.DPRD-pekalongankota.go.id/">http://www.DPRD-pekalongankota.go.id/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	<a href="https://www.youtube.com/user/DPRDkabpekalongan">https://www.youtube.com/user/DPRDkabpekalongan</a>	Tidak Ada	-	
7	Kab. Semarang	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
8	Kab. Banjarnegara	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD.banjarnegarakab.go.id/">http://DPRD.banjarnegarakab.go.id/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
9	Kab. Banyumas	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	<a href="https://www.facebook.com/sekretariatDPRD.kabupatenbanyumas?fref=ts">https://www.facebook.com/sekretariatDPRD.kabupatenbanyumas?fref=ts</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	fb: sekretariat	
10	Kab. Batang	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
11	Kab. Bora	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-blora.go.id/">http://DPRD-blora.go.id/</a>	<a href="https://twitter.com/PRDDBlorakab">https://twitter.com/PRDDBlorakab</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
12	Kab. Boyolali	Tidak Ada			Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	
13	Kab. Brebes	Ada	Aktif	<a href="http://www.DPRD-brebeskab.go.id/">http://www.DPRD-brebeskab.go.id/</a>	Tidak Ada	<a href="https://www.facebook.com/setwan.brebes?fref=ts">https://www.facebook.com/setwan.brebes?fref=ts</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	fb: sekretariat	
14	Kab. Cilacap	Tidak Ada	Tidak aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	

15	Kab. Demak	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
16	Kab. Grobogan	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD.grobogan.go.id/">http://DPRD.grobogan.go.id/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
17	Kab. Jepara	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD.jeparakab.go.id/">http://DPRD.jeparakab.go.id/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	<a href="https://www.facebook.com/DPRD.kabupatenjepara?fref=ts">https://www.facebook.com/DPRD.kabupatenjepara?fref=ts</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	-
18	Kab. Karanganyar	Ada	Aktif	<a href="http://www.karanganyarkab.go.id/tag/DPRD/">http://www.karanganyarkab.go.id/tag/DPRD/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100009558173235&amp;fref=ts">https://www.facebook.com/profile.php?id=100009558173235&amp;fref=ts</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	-
19	Kab. Kendal	Ada	Aktif	<a href="http://www.DPRDkendal.com">http://www.DPRDkendal.com</a>	<a href="https://twitter.com/GemaDPRDd">https://twitter.com/GemaDPRDd</a>	Tidak Ada	<a href="https://www.facebook.com/gemaDPRDd.kdl?fref=ts">https://www.facebook.com/gemaDPRDd.kdl?fref=ts</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	FB dan twitter humas gema kendal
20	Kab. Kebumen	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-kebumenkab.go.id/">http://DPRD-kebumenkab.go.id/</a>	<a href="https://twitter.com/PRDDKbm">https://twitter.com/PRDDKbm</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	FB closed group
21	Kab. Klaten	Tidak Ada			Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
22	Kab. Kudus	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD.kuduskab.go.id/">http://DPRD.kuduskab.go.id/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
23	Kab. Magelang	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-magelangkab.go.id/">http://DPRD-magelangkab.go.id/</a>	<a href="https://twitter.com/PRDDKabMagelang">https://twitter.com/PRDDKabMagelang</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
24	Kab. Pati	Ada	Tidak Aktif	<a href="http://DPRD-patikab.go.id">http://DPRD-patikab.go.id</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
25	Kab. Pekalongan	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-pekalongankab.go.id/">http://DPRD-pekalongankab.go.id/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	<a href="https://www.youtube.com/user/DPRDdkabpekalongan">https://www.youtube.com/user/DPRDdkabpekalongan</a>	Tidak Ada	-
26	Kab. Pemalang	Ada	Aktif	<a href="http://www.DPRD-pemalangkab.go.id/">http://www.DPRD-pemalangkab.go.id/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
27	Kab. Purbalingga	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	<a href="https://twitter.com/PRDDPurbalingga">https://twitter.com/PRDDPurbalingga</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
28	Kab. Purworejo	Ada	Aktif	<a href="http://purworejokab.go.id">http://purworejokab.go.id</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
29	Kab. Rembang	Ada	Aktif	<a href="http://setDPRDd.rembangkab.go.id/">http://setDPRDd.rembangkab.go.id/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
30	Kab. Sragen	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	<a href="https://www.facebook.com">https://www.facebook.com</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	FB public group

31	Kab. Sukoharjo	Ada	Aktif	<a href="http://setDPRDd.sukoharjokab.go.id/">http://setDPRDd.sukoharjokab.go.id/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	book.com/groups/DPRDdsragen/	Tidak Ada	Tidak Ada	-
32	Kab. Tegal	Ada	Aktif	<a href="http://DPRD-tegakab.go.id/">http://DPRD-tegakab.go.id/</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	<a href="https://www.facebook.com/DPRD.kabupatenegalifref=ts">https://www.facebook.com/DPRD.kabupatenegalifref=ts</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	-
33	Kab. Temanggung	Tidak Ada	Tidak Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
34	Kab. Wonogiri	Ada	Aktif	<a href="http://www.DPRD-wonogirikab.go.id/">http://www.DPRD-wonogirikab.go.id/</a>	<a href="https://twitter.com/DPRD_wonogiri">https://twitter.com/DPRD_wonogiri</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-
35	Kab. Wonosobo	Ada	Aktif	<a href="http://www.DPRD-wonosobo.net/">http://www.DPRD-wonosobo.net/</a>	<a href="https://twitter.com/DPRDwonosobo">https://twitter.com/DPRDwonosobo</a>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-

## **Konteks Sosial-Politik-Ekonomi Provinsi Jawa Tengah**

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, dari jumlah tersebut Provinsi Jawa Tengah memiliki 573 kecamatan, 8.578 desa dengan jumlah penduduk mencapai 33,5 juta jiwa atau sekitar 13,29% dari total populasi Indonesia (BPS: 2015). Kondisi tersebut menyebabkan Jawa Tengah menjadi provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara demografi, penduduk di Provinsi Jawa Tengah tidak menyebar secara merata, penduduk masih terkonsentrasi di daerah-daerah kota. Kota Surakarta menjadi daerah dengan tingkat kepadatan tertinggi mencapai 11 ribu jiwa per kilometer persegi (BPS:2015). Hal ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan sinergi dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang dapat menjembatani jarak antara wilayah kota dan desa.

Secara ekonomi mayoritas penduduk Jawa Tengah memiliki mata pencaharian sebagai buruh/karyawan sebesar 31,83%, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 17,55 juta jiwa. Jumlah tersebut mencapai angka 70,72% pada tingkat partisipasi angkatan kerja, sedangkan jumlah pengangguran terbuka di Jawa Tengah mencapai 6,02%. Sementara itu, sektor pertanian menyerap sekitar 30,86% pekerja dan merupakan sektor terbanyak dalam menyerap pekerja karena tidak membutuhkan kemampuan khusus (BPS:2015).

Jumlah pemilih di Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2014 yang lalu mencapai 27,1 juta pemilih yang menghasilkan konfigurasi delapan fraksi pada DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) yang memiliki 27 dari 99 total kursi di DPRD Jawa Tengah, dan partai politik dengan kursi paling sedikit adalah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan jumlah 4 kursi.

Dalam konteks sosial-politik-ekonomi ada beberapa latar belakang yang penting diketahui untuk memahami kondisi Jawa Tengah secara umum, salah satu diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai indeks komposit, IPM memiliki empat indikator utama: tingkat melek huruf, tingkat harapan hidup, harapan lama sekolah, dan tingkat konsumsi per kapita. Merujuk pada data yang dirilis oleh BPS Provinsi Jawa Tengah, nilai IPM dari tahun 2010-2013 selalu menunjukkan tren positif. Data IPM pada tahun 2013, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan angka 74,05 yang berarti bahwa Jawa Tengah masih tergolong pada kategori sedang/menengah menurut klasifikasi IPM oleh UNDP.

Sebagai perbandingan, tabel dibawah ini akan memaparkan nilai IPM beberapa provinsi lain di pulau Jawa pada tahun 2013:

Perbandingan Nilai IPM Provinsi di Pulau Jawa

Provinsi	Nilai IPM	Keterangan
DKI Jakarta	78,59	Menengah
Jawa Tengah	74,05	Menengah
Jawa Barat	73,58	Menengah
Jawa Timur	73,54	Menengah
Daerah Istimewa Yogyakarta	77,37	Menengah
Banten	71,90	Menengah

Sumber: *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Februari 2015, BPS*

Mengacu kepada tabel diatas nilai IPM yang dimiliki oleh Jawa Tengah cenderung masih kompetitif dibandingkan dengan provinsi tetangga di Pulau Jawa. IPM memang tidak bisa menjadi rujukan tunggal dalam melihat pembangunan manusia secara komprehensif pada sebuah daerah, tetapi setidaknya melalui IPM kita bisa mengetahui kondisi umum tentang kondisi penduduk dan kesejahteraannya di daerah tersebut.

Perkembangan teknologi informasi memaksa para pemangku kepentingan untuk dapat menghasilkan kebijakan yang mengaplikasikan penggunaan teknologi informasi. Jawa Tengah menurut BPS (2015) sebanyak 15,37% rumah tangga memiliki akses terhadap komputer/laptop, dan persentase pengguna telepon seluler mencapai 84,07% dari total rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah. Namun, jumlah tersebut belum bisa dijadikan acuan atas perkembangan teknologi informasi, karena ada aspek seperti tingkat penetrasi internet atau jumlah pengguna dan pelanggan jasa internet yang tidak dapat digambarkan secara spesifik melalui data-data yang dirilis oleh BPS.

Parlemen Modern dan Terbuka memiliki tiga indikator utama dalam implementasinya, yaitu; keterbukaan informasi, penggunaan teknologi informasi, dan fungsi representasi. Transformasi menuju Parlemen yang modern dan terbuka membutuhkan dukungan dari berbagai elemen, termasuk dukungan infrastruktur. Mengacu pada data pertumbuhan dan Indeks Pembangunan Manusia yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah, kondisi tersebut dapat dijadikan momentum untuk memulai proses transisi menuju Parlemen Modern dan Terbuka.

Proses tersebut akan semakin diperkuat dengan dukungan dari kelompok penduduk usia muda dan produktif (15-30 tahun) yang mayoritas dari mereka merupakan pengguna aktif dari berbagai layanan teknologi informasi, termasuk di dalamnya pengguna media sosial seperti *Twitter*, *Facebook* dan *Youtube*. Dalam data piramida penduduk Jawa Tengah, komposisi jumlah penduduk tersebut mencapai angka 10,2 juta jiwa atau sekitar 30,4% dari total populasi (BPS:2015). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang besar dalam optimalisasi penggunaan teknologi informasi terutama dalam proses pelibatan masyarakat dalam pembentukan dan perumusan kebijakan, serta dalam sosialisasi kebijakan. Kecenderungan generasi muda untuk terlibat aktif dalam penggunaan berbagai sarana teknologi informasi dapat menjadi pendorong bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menyerap aspirasi tersebut.

Salah satu indikator yang dapat merefleksikan sejauh mana keterlibatan masyarakat di dalam proses perumusan kebijakan adalah tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum. Merujuk kepada data yang dirilis oleh KPU, pada Pemilu Legislatif 2014 Provinsi Jawa Tengah memiliki 27,1 juta pemilih dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 73,89%. Jumlah tersebut hampir mendekati rerata partisipasi pemilih nasional sebesar 75,11%. Angka tersebut menunjukan bahwa terdapat potensi yang besar untuk semakin memperpendek jarak antara rakyat dengan negara, mengingat sudah terbentuk pemahaman dalam masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses politik yang terjadi. Tantangan yang harus dihadapi oleh pengambil kebijakan adalah bagaimana menjaga modal partisipasi yang telah dimiliki ini.

### **Menuju DPRD Modern dan Terbuka**

Untuk menuju DPRD yang modern dan terbuka diperlukan dokumen rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan kerja. Paling tidak ada empat target hasil kinerja yang hendak dicapai. Keempat target tersebut adalah:

1. Terwujudnya pemberitaan yang berimbang dan terpercaya mengenai DPRD
2. Meningkatnya pemahaman publik mengenai peran DPRD
3. Memperbanyak kunjungan konstitusional dalam rangka meningkatkan kepercayaan terhadap DPRD
4. Investasi Demokrasi bagi Indonesia

Untuk dapat mencapai visi dan misinya, DPRD dihadapkan pada dua tantangan utama yang membutuhkan langkah taktis dan strategis dalam menyelesaikannya. Di satu sisi, DPRD harus terus membangun kepercayaan publik, namun di sisi yang lain sebagai lembaga negara harus berkontribusi secara aktif bagi terwujudnya cita-cita kemerdekaan serta penguatan kelembagaan

dalam kerangka konstitusional dan membangun kesadaran publik melalui investasi demokrasi jangka panjang. Dalam hal ini, tentu perlu dirumuskan target taktis dan target secara strategis. Setelah merumuskan masing-masing program yang akan mendorong kedua target tersebut, langkah selanjutnya dilaksanakan lewat penentuan target melalui *output* dan *outcome*. Bentuk hasil pelaksanaan dari masing-masing program tersebut terbagi ke dalam dua bentuk, berimbangnya informasi mengenai DPRD dan dokumen kajian strategis.

Target taktis lebih ditujukan kepada bagaimana membentuk pemahaman masyarakat yang berimbang mengenai DPRD dan sebagai indikator penilaiannya digunakan metode media analisis. Sedangkan untuk target strategis yang hendak dicapai adalah dokumen kajian dan strategis dan implementasinya. Target taktis digunakan sebagai langkah untuk menyeimbangkan secara aktual dan cepat setiap berita yang berpotensi memberikan implikasi negatif terhadap kelembagaan DPRD. Target strategis untuk membangun kesadaran dalam jangka panjang secara menyeluruh.

Alasan dari penggunaan kedua bentuk hasil pelaksanaan ini didasari oleh pembagian target berdasarkan jangka waktu. Target pertama dirancang sebagai target jangka pendek, sedangkan target berikutnya lebih diarahkan menjadi program jangka panjang. Oleh karenanya, target strategis membutuhkan persiapan yang lebih panjang. Sehingga dokumen kajian dan implementasinya merupakan persiapan dan *roadmap* yang akan membantu semakin terarahnya visi dan misi DPRD.

Program-program kerja membangun DPRD modern dan terbuka dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok kegiatan yang terkait:

### 1. Partisipasi Publik dan Keterbukaan Informasi

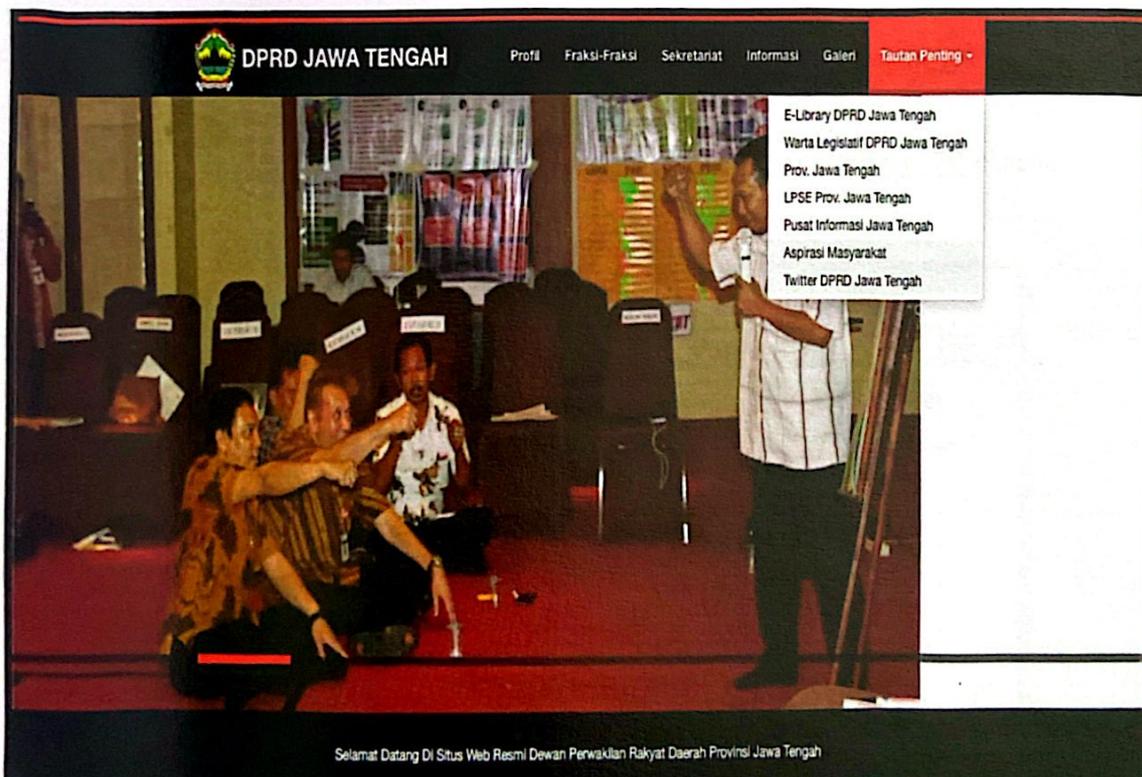


Sebagai sebuah parlemen yang modern, DPRD harus dapat membuka akses yang luas bagi masyarakat, sehingga rakyat dapat mengenal wakil rakyatnya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka layanan pengaduan masyarakat

Source: <http://pengaduan.dpr.go.id/>

baik secara konvensional (surat, telp, fax, unjuk rasa, delegasi masyarakat, dll), ataupun

menggunakan teknologi informasi untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, DPRD memiliki peran dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan tur parlemen, Rapat Dengar Pendapat, kunjungan kerja, dan lain-lain.



Untuk kasus DPRD Provinsi Jawa Tengah telah memiliki kolom 'Tautan Penting'dalam website DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang didalamnya terdapat direktori khusus Aspirasi Masyarakat yang tersambung ke alamat: <http://aspirasi-masyarakat.dprd.jatengprov.go.id>. Namun belum terdapat kontak yang dapat dihubungi, baik dalam bentuk alamat e-mail, nomor telepon, maupun alamat surat. Oleh karena itu aspirasi masyarakat belum dapat diserap secara digital dan ini mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan kinerja dewan lainnya. Untuk itu direkomendasikan agar segera mencantumkan kontak DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Agar dapat bekerja secara optimal, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPRD perlu membangun sarana yang dapat meningkatkan partisipasi publik. Infrastruktur tersebut dapat berupa Perpustakaan dan Museum. Melalui dua sarana ini, masyarakat dapat mempelajari mengenai sejarah DPRD serta peran, fungsi dan tugas DPRD. Keberadaan Museum dan Perpustakaan DPRD juga merupakan bagian memori kolektif bangsa (*state collective memory*) dan pengetahuan kolektif bangsa (*state collective knowledge*). Dengan adanya museum ataupun perpustakaan, masyarakat diharapkan merasa lebih dekat dengan DPRD yang merupakan wakil mereka yang akan menentukan peraturan-peraturan di daerah mereka.

Jika kita melihat Website DPRD Provinsi Jawa Tengah terdapat arsip-arsip yang terdiri dari berbagai kategori buku dan produk hukum (bersifat nasional) yang disimpan dalam Tautan Penting di direktori E-Library DPRD Jawa Tengah (<http://elibrary.dprd.jatengprov.go.id>) dengan tampak sebagai berikut.



Selain itu kerja-kerja yang terkait dengan meningkatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi diantaranya: [1] menyusun *Agenda Setting* yang menabuh genderangnya sendiri; [2] membangun "Kantor" Berita DPRD: *from news room to news-resource center*; [3] melakukan Media Analisis (Cetak, TV, *Online*) yang teratur; [4] menjalin hubungan kerja sama dengan insan media melalui kegiatan *meet the press* secara rutin.

Juga perlu dilakukan *Meet the DPRD Kab/Kota*, dan *meet the university scholars*; [5] dukungan perlu ditingkatkan dengan lebih banyak menerima kunjungan publik ke DPRD, baik untuk menghadiri sidang-sidang dewan, kunjungan museum, perpustakaan, dan lain-lain. Perlu dipertimbangkan juga untuk lebih mengoptimalkan: penggunaan fasilitas perpustakaan DPRD dengan memfokuskan koleksi perpustakaan yang berkaitan dengan produk DPRD. Dalam upaya menjangkau pengguna perpustakaan yang lebih luas, maka fasilitas pendukung tersebut harus ditingkatkan melalui: a) pembangunan infrastruktur; b) pengembangan koleksi perpustakaan yang terkait dengan kinerja DPRD; c) peningkatan sistem *digital library*; d) peningkatan sistem dengan membangun *virtual DPRD tour* yang terintegrasi dengan *website* DPRD.

## 2. Teknologi dan Informasi

Di era digital ini, sudah merupakan suatu keniscayaan bagi lembaga perwakilan rakyat seperti DPRD untuk memiliki *website* yang dapat menyampaikan informasi terkait dengan hasil kerja DPRD. Hasil kerja DPRD, baik yang berupa Peraturan Daerah, risalah rapat, rekam jejak anggota dewan (*hansard*) dan rekam jejak lembaga dewan (*bill digest*), dapat ditampilkan dalam *website*. Selain *website*, media sosial seperti *facebook*, *twitter* dan *youtube* menjadi penting peranannya, terutama terkait dengan menyampaikan informasi resmi seputar kinerja DPRD. Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lengkap dan cepat.

Keberadaan *website* dan media sosial juga menjadi salah satu penunjang keterbukaan informasi DPRD. Dengan adanya sarana-sarana ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan pengawasan akan kinerja DPRD. *Website* dan media sosial juga harus dimiliki oleh para anggota DPRD secara pribadi. Hal ini dikarenakan, *website* dan media sosial mempermudah para anggota DPRD untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat.

Kerja-kerja yang terkait dengan teknologi informasi digital, di antaranya: [1] mengoptimalkan pengelolaan *website* yang mudah diakses serta menyediakan informasi terkini dan membuka

ruang bagi interaksi virtual antara DPRD dengan publik; [2] untuk menjangkau pengguna *website* yang lebih luas dan menjadikan fasilitas tersebut lebih bermanfaat untuk publik, maka perlu dibangun *website* yang dwi bahasa (*bilingual*); [3] mengoptimalkan penggunaan *social media* (*twitter, facebook, Youtube*) dan sosialisasinya. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah menyelenggarakan Kopi Darat *Blogger Meeting #KenalDPRD, Website, Youtube-PSA (Filler; Short Film)*; [4] mengoptimalkan penggunaan portal internal (*intranet*) DPRD sebagai sarana komunikasi dan koordinasi baik antara Pimpinan dengan Anggota Dewan dari semua fraksi, antara Pimpinan/Anggota dengan Setwan/Sekwan, juga antara para Anggota Dewan dari semua fraksi, antara Setwan dan semua staf pendukung.

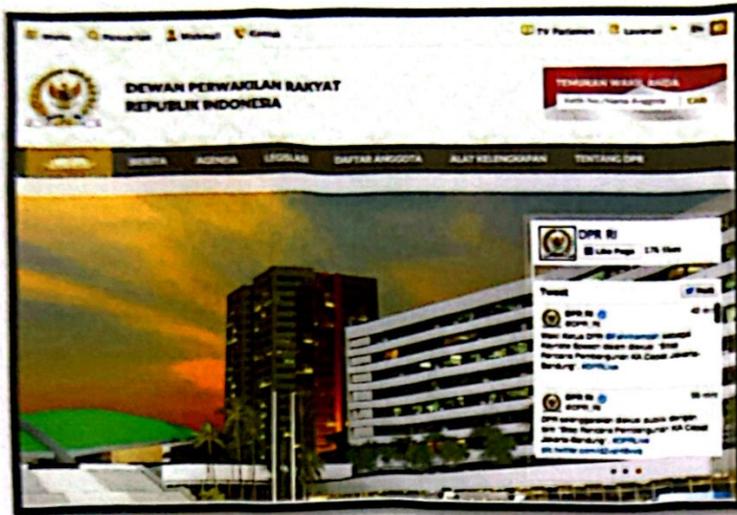
Penting bagi DPRD untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan parlemen modern. Teknologi informasi akan memudahkan dan memperkuat peningkatan kinerja anggota Dewan. Sementara itu masyarakat, menjadi mudah dan cepat dalam mengakses informasi yang diproduksi oleh DPRD. DPRD saat ini penting untuk membangun perangkat dan infrastruktur yang berbasis teknologi dan informasi digital. Beberapa program kegiatan yang perlu diperhatikan antara lain:

**Website.** Merupakan salah satu instrumen teknologi informasi yang memuat informasi dan berita. Sebagai lembaga negara perwakilan rakyat, DPRD RI membutuhkan portal informasi dan berita agar publik dapat memperoleh informasi tentang proses dan hasil kinerja dewan. Melalui *website*, publik semakin mudah untuk mengawasi kinerja DPRD RI. Di dalam *website*, publik dapat mengakses profil anggota dewan, agenda rapat DPRD RI, risalah rapat (*hansard*), maupun proses pembuatan undang-undang/Peraturan Daerah (*BillDigest*).

No.	Judul	Tanggal
1	Rapat Bekerja Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah	05-11-2015
2	Rapat Bekerja Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah	05-11-2015
3	Rapat Bekerja Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah	05-11-2015
4	Rapat Bekerja Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah	05-11-2015
5	Rapat Bekerja Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah	05-11-2015
6	Rapat Bekerja Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah	05-11-2015
7	Rapat Bekerja Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Berekam	04-11-2015
8	Rapat Bekerja Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Berekam	04-11-2015
9	Rapat Bekerja Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Berekam	04-11-2015
10	Rapat Bekerja Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah di Ruang Berekam	04-11-2015

Dalam kolom informasi pada halaman pertama website DPRD Provinsi Jawa Tengah, bisa kita lihat jadwal yang terdiri dari judul agenda serta tanggal.

<http://dprd.jatengprov.go.id/>



Dalam halaman website DPR RI sebagaimana tampilan disamping ada berbagai direktori laman yang mempermudah pengunjung untuk berselancar.

<http://www.dpr.go.id/>

Media Sosial (twitter,

facebook, dan youtube). Media Sosial merupakan salah satu media bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara *online*. Untuk sebuah lembaga atau badan usaha, kehadiran media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan berita secara cepat dan efektif ke publik. Selain itu, melalui media sosial lembaga DPRD dapat menjangkau aspirasi masyarakat, ataupun membentuk *agenda setting*.



Bila melihat website DPRD Jawa Tengah, belum ada hubungan dengan laman Facebook DPRD Jawa Tengah. Sementara untuk akun twitter website DPRD Jawa Tengah telah terhubung langsung dengan akun

@setwanjateng (Sekretariat DPRD Jawa Tengah). Di dalam bio twitter tersebut baru tercantum kontak yang dapat dihubungi, terdiri dari nomor telepon ponsel dengan alamat kantor Jl. Pahlawan No. 7 Semarang. Jumlah pengikut dari akun tersebut adalah 342 akun dengan tweet terakhir pada tanggal 21 Desember 2015. Sementara untuk jejaring YouTube website DPRD Jawa Tengah belum terhubung dengan laman YouTube DPRD Jawa Tengah.



Media Sosial DPR RI (dari kiri ke kanan): Fan Page Facebook DPRD RI, Twitter DPRD RI, Channel Youtube DPRD RI

Video PSA (Public Service Announcement) dan Infografis. Video dan infografis merupakan produk dari teknologi informasi yang ditujukan kepada publik dan bersifat kreatif, imajinatif, serta komunikatif. Video PSA dan Infografis dilakukan dalam kegiatan *online* dan *offline*.



Keduanya disebarakan melalui website dan media sosial resmi DPRD untuk kegiatan *online*.



Sedangkan untuk kegiatan *offline* dapat disebarakan kepada publik melalui kunjungan ke DPR ataupun dalam acara-acara tertentu. Dalam kolom informasi pada halaman pertama website DPRD Provinsi Jawa Tengah, telah ada berita yang dapat diakses oleh publik. Jenis

berita adalah berita kunjungan kerja yang meliputi tiga kunjungan kerja pada tanggal 03-11-2015 dan 01-10-2015.

Sementara dalam kolom Tautan Penting di direktori Warta Legislatif DPRD Jawa Tengah, meskipun akan merujuk ke halaman yang lain yakni <http://wartalegislatif.dprd.jatengprov.go.id/> namun dalam laman tersebut memuat berita mengenai DPRD Jawa Tengah yang bersifat aktual dan spesifik dari masing-masing Alat Kelengkapan Dewan.

Berbagai informasi, agenda dan kegiatan kedewanan ini tentu akan lebih menarik jika disajikan dengan lebih kreatif dan informatif melalui Video PSA dan Infografis. Sehingga para penonton/pembaca menjadi lebih tertarik melihat informasi/berita yang hendak disampaikan.



*Kopi Darat.* Sering kali ketika kita mendengar kata teknologi informasi kita akan terpusat pada kegiatan-kegiatan *online*. Namun, kegiatan *offline* juga penting dilakukan untuk dapat menunjang kegiatan-kegiatan *online* tersebut. Karena itu,



sangat penting untuk dapat membangun jaringan kerja di dunia maya. Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap media DPRD dan memberikan kesempatan bagi publik untuk dapat bertemu langsung dan mengklarifikasikan beberapa informasi yang belum jelas bagi mereka. Selain itu, komunitas *Blogger* dan *netizen* memiliki peranan penting dalam menyampaikan informasi yang bersifat lebih personal bagi pembacanya. Cara mereka berkomunikasi melalui tulisan kadang dapat membentuk pola berpikir dari pembacanya. Hal ini dilakukan untuk dapat membangun citra positif DPRD sesuai dengan apa yang telah dicapai. Salah satu program membangun jaringan dunia maya dapat dilakukan melalui program *Kopi Darat*.

### 3. Fungsi Representasi

DPRD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sebagai wakil rakyat, setiap anggota DPRD wajib melaksanakan fungsi representasi dengan baik, dan itu merupakan salah satu indikasi parlemen modern. Fungsi representasi antara lain ditandai oleh kemampuan anggota DPRD dalam menyerap, mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat. Dengan demikian, anggota DPRD akan semakin dekat dengan rakyat dan konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Dua program penting untuk melaksanakan fungsi representasi, yaitu: Rekam Jejak Legislasi Lembaga Dewan (*Bill Digest*) dan Rekam Jejak Anggota Dewan (*Hansard*).

Kerja yang terkait dengan fungsi representasi dewan, diantaranya: [1] membangun sistem Rekam Jejak Lembaga Dewan (*Bill Digest*) yang digunakan untuk lebih membuka ruang peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi baik dukungan maupun tuntutan. Sistem

#### Hansard

• *Hansard is the official record of the proceedings of the Parliament. It is not a strictly verbatim record, but rather a verified and accurate record. Repetitions and redundancies may be omitted and obvious mistakes corrected. Interjections not responded to by the principal speaker are omitted. Hansard has no editorial policy other than the pursuit of accuracy and consistency.*

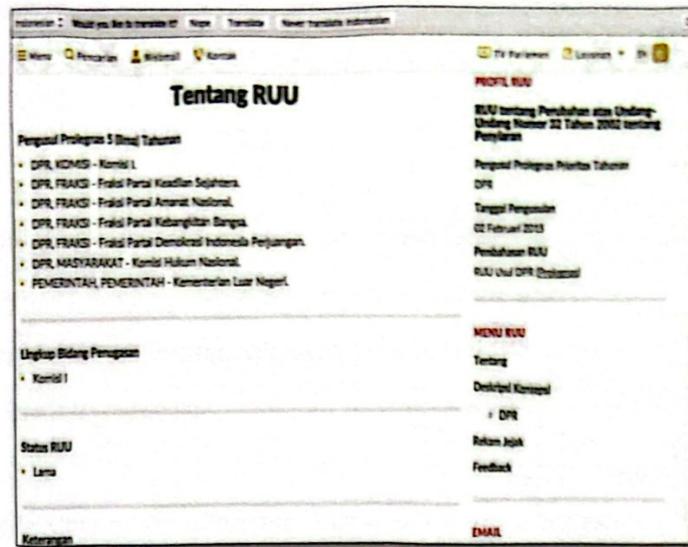
• *Sumber: FACT SHEET 19: RECORDS OF THE HOUSE, Parliament NSW, Australia. p.4*

Rekam Jejak Lembaga Dewan (*Bill Digest*) akan diintegrasikan dengan *website*; dan [2] membangun sistem Rekam Jejak Anggota Dewan (*Hansard*) yang digunakan untuk menginformasikan opini dan posisi politik Anggota Dewan terhadap isu-isu tertentu. Sistem Rekam Jejak Anggota Dewan (*Hansard*) akan diintegrasikan dengan *website*. Dalam skala yang

paling minimal terdapat risalah rapat dan hasil-hasil rapat dan diunggah ke dalam website DPRD.

## Rekam Jejak Legislasi Lembaga Dewan (*Bill Digest*)

Rekam Jejak Legislasi Lembaga Dewan (*Bill Digest*) merupakan program kegiatan digitalisasi proses pembentukan undang-undang di DPRD RI yang dipublikasikan melalui website resmi DPRD RI ([www.DPR.go.id](http://www.DPR.go.id)). Melalui *Bill Digest*, publik dapat mengikuti proses pembentukan undang-undang. *Bill Digest* memiliki kelebihan, antara lain memberi



ruang bagi partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang secara *online*. Publik dapat menyampaikan aspirasi, rekomendasi, dan kritik terhadap substansi dari undang-undang yang sedang dibahas pada setiap tahapan proses penyusunannya.



### Proses Penyusunan *Bill Digest*

Sumber: Humas DPR RI

### Rekam Jejak Anggota Dewan (*Hansard*)

Rekam Jejak Anggota Dewan (*Hansard*) merupakan transkrip digital aktivitas rapat dan persidangan Anggota Dewan. *Hansard* adalah bukti proses rapat dan sidang di DPRD RI. Melalui

#	TANGGAL	JUDUL	TAHUN SIDANG	MASA SIDANG	RAPAT KE
1	01-07-2015	Risalah Resmi Rapat Paripurna ke-35, 1 Juli 2015	2014-2015	IV	35
2	25-06-2015	Risalah Resmi Rapat Paripurna ke-34, 25 Juni 2015	2014-2015	IV	34
3	23-06-2015	Risalah Resmi Rapat Paripurna ke-33, 23 Juni 2015	2014-2015	IV	33
4	28-05-2015	Risalah Resmi Rapat Paripurna ke 31, 28 Mei 2015	2014-2015	IV	31
5	26-05-2015	Risalah Resmi Rapat Paripurna ke 30, 26 Mei 2015	2014-2015	IV	30
6	20-05-2015	Risalah Resmi Rapat Paripurna ke 29, 20 Mei 2015	2014-2015	IV	29

*Hansard*, publik dapat mengetahui kinerja setiap Anggota Dewan.

Contoh *Risalah Rapat* dalam website [www.DPR.go.id](http://www.DPR.go.id)

Aksesibilitas publik terhadap fungsi kedewanan merupakan sebuah hal yang dapat memengaruhi citra dewan di mata publik. Namun memang masih sedikit fungsi kedewanan yang dimunculkan dalam website DPRD Provinsi Jawa Tengah ini, berikut merupakan penjelasan lebih lanjut hasil penelusuran Tim CEPP FISIP UI:

a. Fungsi Legislasi

Belum ada konten website yang memperlihatkan sejauh mana kinerja legislasi dari DPRD Jawa Tengah sebagai lembaga. Misalnya peraturan daerah apa yang telah atau sedang melalui proses perumusan, maupun produk legislasi lainnya yang khusus hasil kinerja DPRD Jawa Tengah.

b. Fungsi Anggaran

Belum ada konten website yang memperlihatkan kinerja DPRD Jawa Tengah dalam segi anggaran.

c. Fungsi Pengawasan

Kinerja kedewanan dalam hal pengawasan dapat terlihat dari kegiatan Kunjungan Kerja yang terdapat dalam galeri foto sertadirektori Warta Legislatif DPRD Jawa Tengah. Perlu diketahui bahwa website ini telah terhubung dengan website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat diakses melalui direktori Tautan Penting.

Berdasarkan UU MD3, anggota DPRD berasal dari partai politik dan dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Oleh karena itu, diperlukan suatu sarana di mana rakyat dapat mengawasi sekaligus memastikan para wakil rakyat yang mereka pilih dapat bekerja dalam rangka. Sarana yang dimaksud dapat berupa Rekam Jejak Legislasi Lembaga Dewan (*Bill Digest*) dan Rekam Jejak Anggota Dewan (*Hansard*), menjadi dua program yang penting dalam melaksanakan fungsi ini.

*Bill Digest* merupakan program kegiatan digitalisasi proses pembuatan. Peraturan Daerah (*Perda*) yang kemudian dapat dipublikasikan melalui *website* resmi DPRD. Selain mengetahui proses pembentukan *Perda*, melalui *Bill Digest* juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat mempengaruhi substansi *Perda* yang sedang dibahas. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan *Perda*, diharapkan menjadikan *Perda* yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Selanjutnya, rekam jejak anggota dewan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Hansard*, merupakan transkrip digital akan aktivitas rapat para anggota DPRD. Melalui *Hansard*, publik

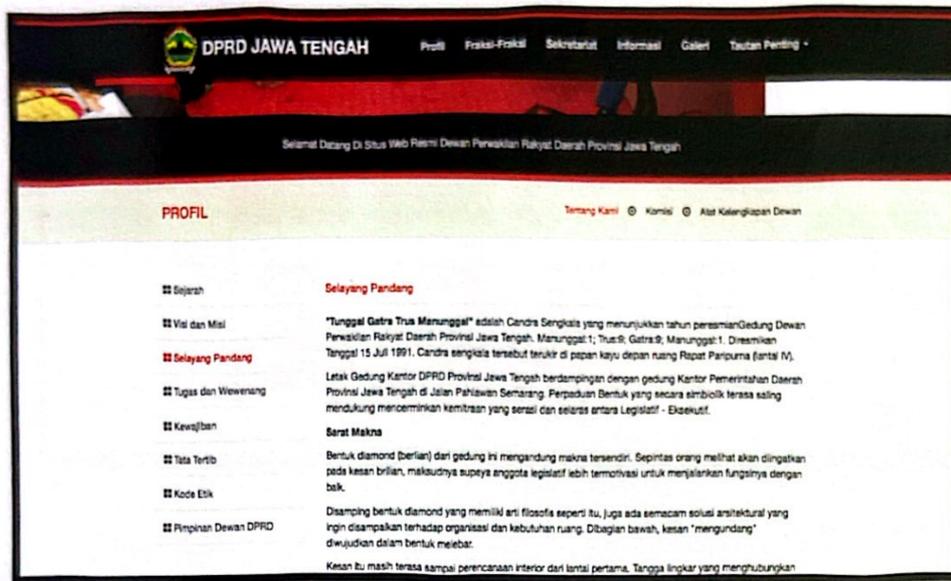
dapat mengetahui kinerja Anggota DPRD. Prinsip parlemen modern yang mengedepankan aksesibilitas dan transparansi, akan memudahkan kinerja baik anggota DPRD maupun masyarakat yang ingin memberikan pengaduan. Komunikasi antara rakyat dan wakilnya dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dibutuhkan oleh DPRD untuk dapat bekerja sebagai wakil rakyat. Keberadaan *hansard* dan *bill digest* juga merupakan bentuk transparansi demi akuntabilitas lembaga atau wakil rakyat.

Beberapa Informasi Umum yang bisa ditemui dalam website DPRD Prov Jawa Tengah

<http://dprd.jatengprov.go.id/>

### Sejarah/Selayang Pandang

Informasi umum yang terdiri dari sejarah dan selayangng pandang telah dicantumkan secara singkat dan padat pada halaman pertama web.



### Profil Anggota

Walaupun belum terdapat profil anggota yang memperlihatkan rekam jejak anggota DPRD Jawa Tengah kepada publik, namun informasi berupafoto, nama anggota, pendidikan terakhir, beserta dengan Fraksi dan posisi di dalam Alat Kelengkapan Dewan telah tersedia.



## Fraksi

Telah terdapat kolom fraksi yang mencantumkan anggota masing-masing partai politik di dalam DPRD Jawa Tengah. Di dalam kolom fraksi inilah profil anggota dewan dapat diakses yang berisikan nama anggota, foto, dan pendidikan terakhir.



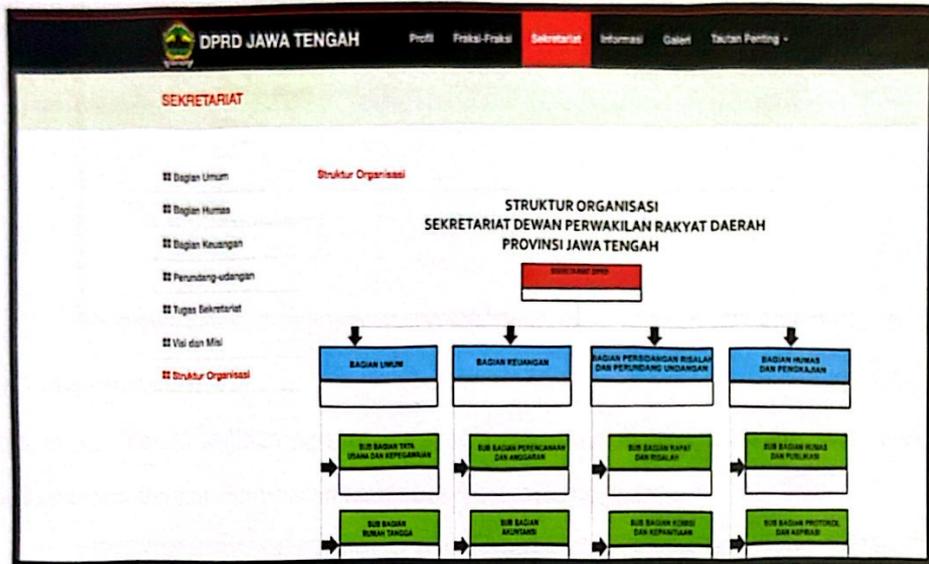
## Komisi

Telah terdapat kolom komisi yang mencantumkan deskripsi dari komisi tersebut beserta dengan anggota masing-masing komisi. Hal ini dapat mempermudah publik untuk mengetahui komisi yang membawahi bidang-bidang yang menjadi *concern* publik.



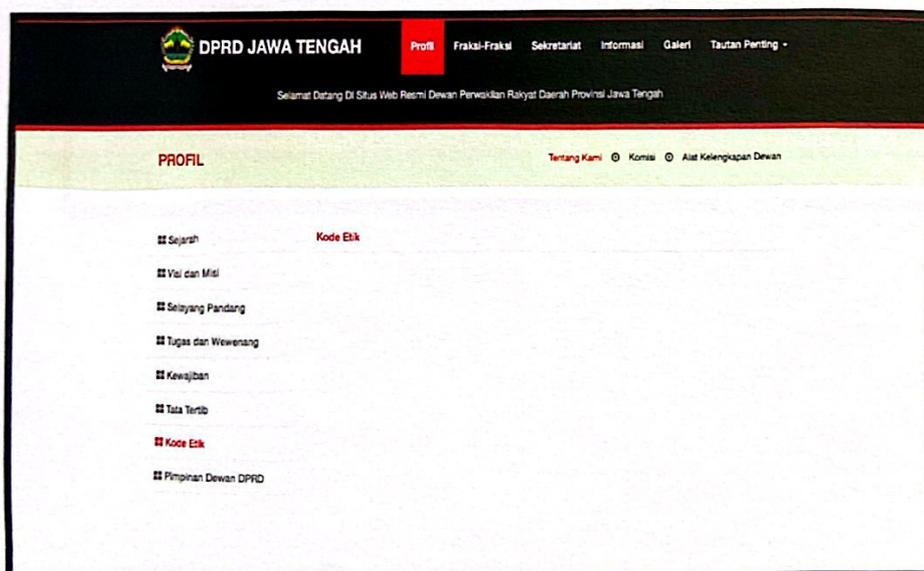
## Sekretaris Jenderal

Dalam kolom Sekretariat, telah tercantum lengkap dari mulai visi dan misi hingga tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam Sekretariat Jenderal. Kesemua direktori yang terdiri dari (1) Bagian Umum, (2) Bagian Humas, (3) Bagian Keuangan, (4) Perundang-undangan, (5) Tugas Sekretariat, (6) Visi dan Misi, serta (7) Struktur Organisasi telah dilengkapi oleh deskripsi dan substansi yang dapat membuat publik memahami posisi serta fungsi Setjen dalam DPRD Jawa Tengah.



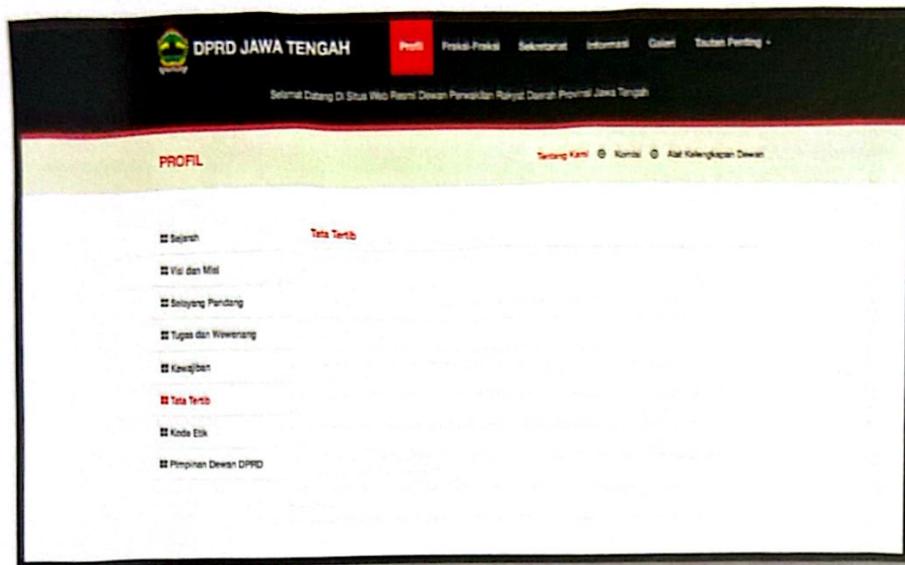
## Kode Etik

Kolom bagi Kode Etik telah tersedia dalam laman pertama web ini, namun belum memiliki substansi yang dapat diakses oleh publik. Berikut merupakan tampak dari kolom Kode Etik.



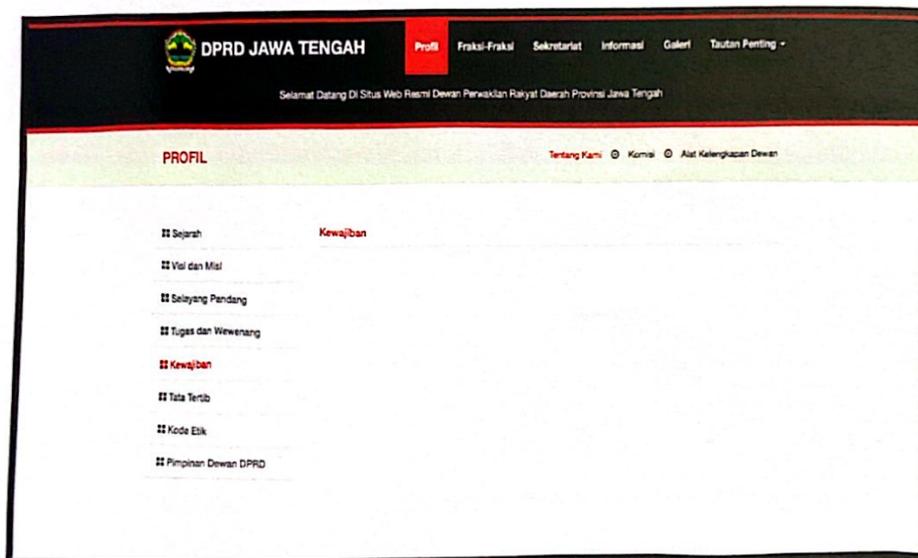
### Tata Tertib

Sama halnya seperti Kode Etik, kolom Tata Tertib telah tersedia dalam laman pertama website ini tetapi belum diisi oleh substansi. Berikut merupakan tampak dari kolom Tata Tertib.



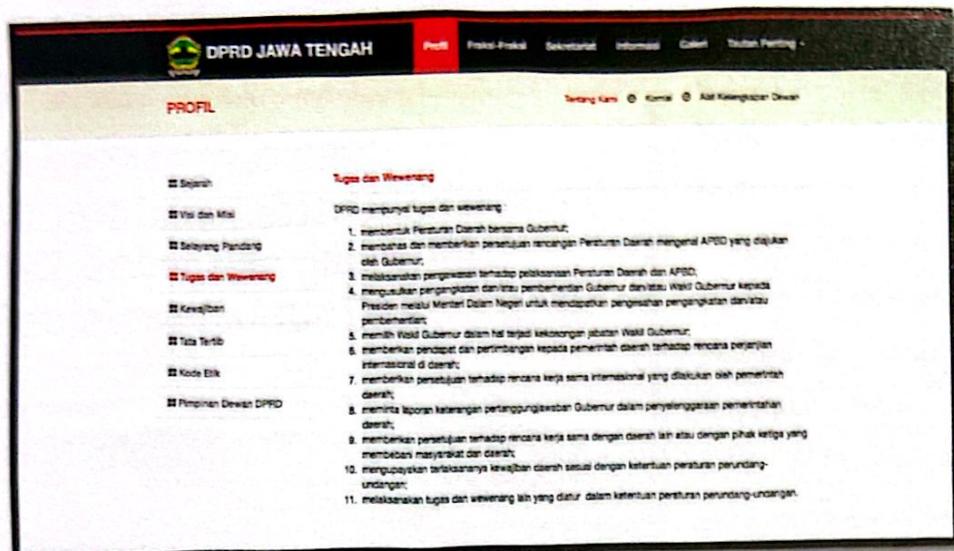
### Hak dan Kewajiban

Kolom Hak dan Kewajiban juga telah tersedia dalam laman pertama website ini namun masih belum terisi. Berikut merupakan tampak dari kolom Kewajiban.



## Tugas dan Wewenang

Telah tersedia informasi mengenai Tugas dan Wewenang DPRD Jawa Tengah di laman pertama website ini.



The screenshot shows the official website of the DPRD Jawa Tengah. The header includes the logo and name 'DPRD JAWA TENGAH' along with navigation links for 'Profil', 'Fungsi-Fungsi', 'Seksi/Seksi', 'Informasi', 'Galeri', and 'Tribun Pening'. The main content area is titled 'PROFIL' and features a sidebar with a menu: 'Sejarah', 'Visi dan Misi', 'Selayang Pandang', 'Tugas dan Wewenang' (highlighted in red), 'Kewajiban', 'Tata Tertib', 'Kode Etik', and 'Pimpinan Dewan DPRD'. The 'Tugas dan Wewenang' section is expanded, showing a list of 11 duties and powers of the DPRD.

**Tugas dan Wewenang**

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

1. membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
4. mengusulkan pengangkatan dan luluq pembantuan Gubernur dan luluq Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan luluq pembantuan;
5. memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membeban masyarakat dan daerah;
10. mengusulkan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Berbagai Opini Publik Atas Kinerja Legislasi DPRD Jawa Tengah 2015:



Pada 2015 lalu DPRD Jawa Tengah hanya menyelesaikan 10 dari 19 raperda (52%), antara lain Perda Pelayanan Publik, Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Perda tentang Keolahragaan, Perda tentang Kearsipan, Perda Rancana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang. Pencapaian pembuatan Perda selama 2015 lalu lebih baik dibandingkan DPRD DKI Jakarta yang hanya dapat menyelesaikan lima perda dari 17 raperda atau 29%, DPRD Jawa Timur (Jatim) dari 28 raperda dapat rampung 14 perda atau 50%, dan Jawa Barat (Jabar) dari 30 raperda dapat selesai 11 perda atau 46%. Wakil

Ketua Badan Pembuat Perda DPRD Jateng, Yudhi Indras mengatakan lambatnya pembuatan perda karena pengajuan prolegda oleh eksekutif tidak langsung disertai naskah akademik dan draf raperda, sehingga membutuhkan waktu lama.

DPRD Jawa Tengah menargetkan bisa merampungkan 20 program legislasi daerah (Prolegda) selama 2016. Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi mengatakan, dari 20 prolegda baru itu, 11 di antaranya merupakan prolegda baru dan sembilan lainnya merupakan raperda luncuran dari Prolegda 2015.

<http://gaul.solopos.com/kinerja-DPRD-jateng-mengklaim-lebih-unggul-dari-DPRD-dki-jabar-dan-jatim-ini-penjelasan-ketua-DPRD-jateng-682019>

<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=6&n=36&date=2016-01-19>

Rencana pembangunan gedung baru DPRD Jateng senilai Rp12 miliar ditunda.

Selasa, 2 Februari 2016

Follow us on   

SEMARANGPOS.COM  
**SEMARANG**

**HOME** NEWS SEMARANG SEPAKBOLA SPORT TEKNO LIFESTYLE HIBURAN

 **AsianDating.com**  
Asian Dating and Singles

**DISCOVER  
TRUE LOVE TODAY**

**GEDUNG DPRD JATENG**  
**Proyek Pembangunan Gedung Baru Rp12 Miliar  
Ditunda**



*Gedung Berlian Kantor DPRD Jateng (infojauwatengah.blogspot.com/ilustrasi)*

<http://www.semarangpos.com/2015/11/26/gedung-DPRD-jateng-proyek-pembangunan-gedung-baru-rp12-miliar-ditunda-665086>

Kinerja Fungsi Anggaran: APBD Jateng 2016 Defisit Rp400 Miliar, Tapi Tetap Disahkan

Selasa, 2 Februari 2016

Follow us on    

**SOLOPOS.COM**  
NEWS

[Home](#) [Ekonomi](#) [Hukum](#) [Internasional](#) [Pendidikan](#)

**INFORIAL**      **LOWONGAN KERJA : RS Indriati Solo Baru Buka**

## Dunia Keuangan InstaForex

40% bonus for each deposit Leverage dari 1:1 sampai 1:1000

● ○

### APBD Jateng 2016 Defisit Rp400 Miliar, Tapi Tetap Disahkan

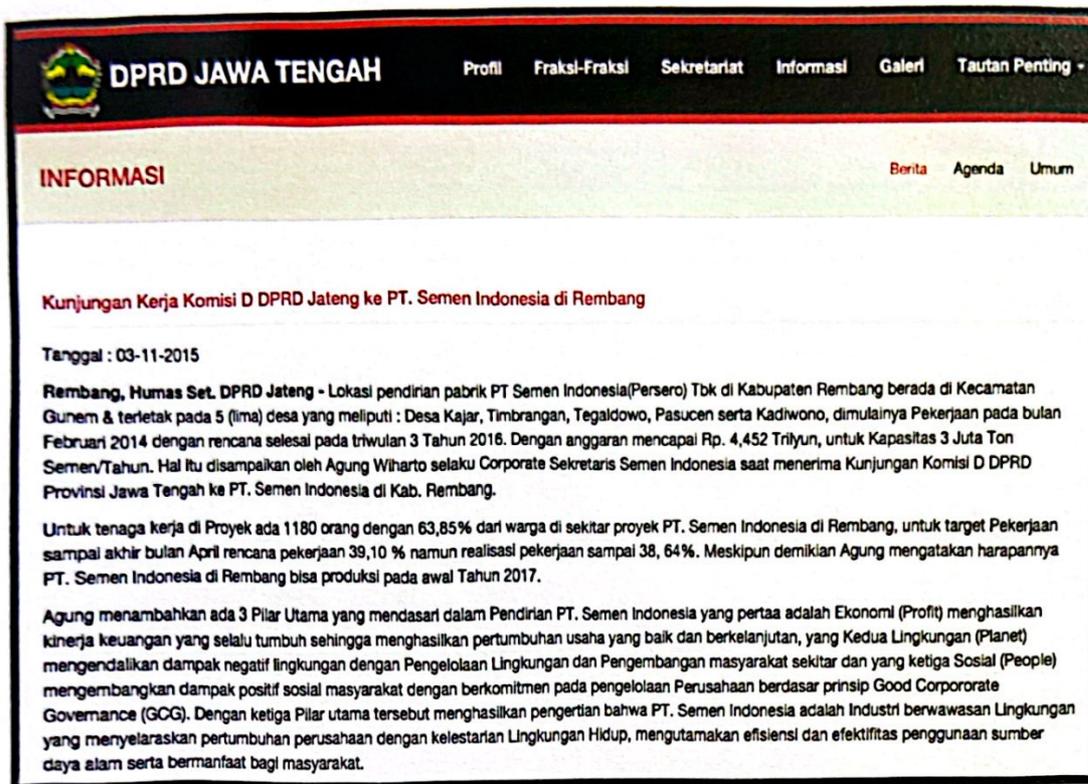


Gedung Berlian Kantor DPRD Jateng (info:awatengah.blogspot.com/ilustrasi)

Rebu, 25 November 2015 22:40 WIB | [JemberFoto](#) / [JRI/Solopos](#)

<http://www.solopos.com/2015/11/25/apbd-jateng-2016-defisit-rp400-miliar-tapi-tetap-disahkan-664770>

## Kinerja Fungsi Pengawasan: Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Jateng ke PT. Semen Indonesia di Rembang



**DPRD JAWA TENGAH** Profil Fraksi-Fraksi Sekretariat Informasi Galeri Tautan Penting -

**INFORMASI** Berita Agenda Umum

**Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Jateng ke PT. Semen Indonesia di Rembang**

Tanggal : 03-11-2015

**Rembang, Humas Set. DPRD Jateng** - Lokasi pendirian pabrik PT Semen Indonesia(Persero) Tbk di Kabupaten Rembang berada di Kecamatan Gunem & terletak pada 5 (lima) desa yang meliputi : Desa Kajar, Timbrangan, Tegaldowo, Pasucen serta Kadiwono, dimulainya Pekerjaan pada bulan Februari 2014 dengan rencana selesai pada triwulan 3 Tahun 2016. Dengan anggaran mencapai Rp. 4,452 Trilyun, untuk Kapasitas 3 Juta Ton Semen/Tahun. Hal itu disampaikan oleh Agung Wiharto selaku Corporate Sekretaris Semen Indonesia saat menerima Kunjungan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah ke PT. Semen Indonesia di Kab. Rembang.

Untuk tenaga kerja di Proyek ada 1180 orang dengan 63,85% dari warga di sekitar proyek PT. Semen Indonesia di Rembang, untuk target Pekerjaan sampai akhir bulan April rencana pekerjaan 39,10 % namun realisasi pekerjaan sampai 38, 64%. Meskipun demikian Agung mengatakan harapannya PT. Semen Indonesia di Rembang bisa produksi pada awal Tahun 2017.

Agung menambahkan ada 3 Pilar Utama yang mendasari dalam Pendirian PT. Semen Indonesia yang pertaa adalah Ekonomi (Profit) menghasilkan kinerja keuangan yang selalu tumbuh sehingga menghasilkan pertumbuhan usaha yang baik dan berkelanjutan, yang Kedua Lingkungan (Planet) mengendalikan dampak negatif lingkungan dengan Pengelolaan Lingkungan dan Pengembangan masyarakat sekitar dan yang ketiga Sosial (People) mengembangkan dampak positif sosial masyarakat dengan berkomitmen pada pengelolaan Perusahaan berdasar prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dengan ketiga Pilar utama tersebut menghasilkan pengertian bahwa PT. Semen Indonesia adalah Industri berwawasan Lingkungan yang menyelaraskan pertumbuhan perusahaan dengan kelestarian Lingkungan Hidup, mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya alam serta bermanfaat bagi masyarakat.

<http://DPRD.jatengprov.go.id/post/kunjungan-kerja-komisi-d-dprd-jateng-ke-pt-semen-indonesia-di-rembang>

## **Profil Organisasi DPRD di Indonesia**

### **1. Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)**

Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia merupakan paguyuban yang terdiri dari pimpinan DPRD dan sekretaris dewan di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Saat ini, ADPSI dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Saefullah periode 2015-2020. Sebelumnya, Ketua ADPSI periode sebelumnya 2010-2015 dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mayjen TNI (Purn) H. Ferrial Sofyan. ADPSI beralamat di jalan Kebon Sirih 18, Gambir, Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta. Kontak Telepon (021) 3822152, Fax: (021) 34830069 dan tidak ada website aktif.

### **2. Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)**

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia ( "ADKASI" ) merupakan organisasi yang anggotanya adalah DPRD Kabupaten seluruh Indonesia yang saat ini berjumlah 415. Didirikan pada tanggal 28 Agustus 2001, ADKASI bertujuan untuk mewujudkan DPRD Kabupaten yang efektif dalam mendorong tata pemerintahan yang baik menuju pembangunan yang berkelanjutan dalam kerangka otonomi daerah dan demokrasi. ADKASI beralamat di Gedung Yarnati Lt. 1 Jl. Proklamasi No. 44 Jakarta 10320 Telp. 021 - 3156785 Faks. 021 – 31904861. Tidak ada website aktif

### **3. Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI)**

Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) adalah Organisasi otonom dan independen terdiri dari 90 DPRD Kota dari seluruh Indonesia. ADEKSI didirikan pada tanggal 26 Juni 2001 sebagai bagian dari program desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomi daerah.

ADEKSI melaksanakan tiga kegiatan utama yakni memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kapasitas anggotanya, kegiatan advokasi dan penyediaan layanan informasi dan publikasi. ADEKSI melakukan kerjasama dan didukung oleh lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri yang memiliki misi dan visi yang sejalan, diantaranya terciptanya tata pemerintahan lokal yang baik (good local governance), peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah melalui peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. ADEKSI beralamat di KOMPLEK RASUNA EPICENTRUM ROP III WO-10JI. Taman Rasuna Selatan, Kuningan, Jakarta 12960 Phone. +6221-83788653, 83786087 Fax. +6221-83786087 Hotline: +628121018679 E-mail: [seknas@adeksi.or.id](mailto:seknas@adeksi.or.id) website <http://www.adeksi.or.id>

#### 4. Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI)

Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia atau ASDEKSI d/h Forum Komunikasi dan Konsultasi Sekretaris DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia atau disingkat FORKOMKON Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia adalah suatu organisasi profesi yang Anggota dan Pengurusnya berasal dari Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini telah ada 489 Anggota sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota termasuk hasil pemekaran daerah tahun 2008.

Pembentukan ASDEKSI bermula dari kegiatan Workshop Peningkatan Wacana dan Kinerja Sekretaris DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia pada tanggal 2 – 3 Juli 2001 di Hotel Grand Cempaka – Jakarta. Pada kegiatan tersebut banyak wacana seperti permasalahan yang kerap di hadapi para Sekwan di daerah menjadi bahan diskusi sehingga beberapa Sekwan yang hadir pada saat itu mengusulkan untuk membentuk suatu organisasi yang bisa memediasi atau memfasilitasi permasalahan dan kebutuhan para sekwan. Dari pertemuan tersebut berhasil melahirkan rekomendasi “Perlu adanya forum komunikasi dan konsultasi, sebagai wadah media tukar menukar informasi Sekretaris DPRD baik di tingkat Nasional maupun regional yang difasilitasi oleh Pemerintah”. Selain itu dengan adanya wadah ini juga diharapkan bisa berfungsi memberikan dukungan dan fasilitas pemberdayaan SEKWAN dalam mensinergikan kebijakan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dari wacana dan rekomendasi inilah akhirnya melahirkan Forum Komunikasi dan Konsultasi Sekretaris DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia atau disingkat FORKOMKON Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia yang dideklarasikan melalui MUNAS I pada tanggal 9 s/d 11 Nopember 2001 di Hotel Intan Bali Kabupaten Badung- Provinsi Bali. Keberadaan FORKOMKON Sekretaris DPRD Seluruh Indonesia kemudian mendapat pengakuan dari Menteri Dalam Negeri RI melalui suratnya No. 165/1092/OTDA tanggal 18 September 2002. Dan pada tahun 2008 akta pendirian ASDEKSI juga dibuat dengan No. -24- tanggal 18 Maret 2008 melalui Notaris Lily Harjati Soedewo, SH.MKn.

Sekretariat Nasional (SEKNAS) Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) beralamat di Gedung The Boulevard Lt.3/3A-2 Jl. Fachruddin Raya No. 5 Jakarta Pusat, Telp. : 021 31991309 Fax. : 021 31991346 E mail : [asdeksi@gmail.com](mailto:asdeksi@gmail.com), : [asdeksi@yahoo.com](mailto:asdeksi@yahoo.com), Web. [www.asdeksi.org](http://www.asdeksi.org)